

KEBUDAYAAN

Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran
Nusantara sebagai Basis Peradaban



Rumusan Hasil
Kongres Kebudayaan Desa
1 Juni-15 Agustus 2020

KEBUDAYAAN

Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis
Peradaban

Webinar Seri 10
Kongres Kebudayaan Desa 2020
1-10 Juli 2020



KEBUDAYAAN

Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban

© Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

**Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggungharjo,
Yogyakarta**

Web: www.sanggarinovasidesa.id

Penanggung jawab : Faiz Ahsoul

Editor : Irfan Afifi

Penyelia aksara : Dyah Permatasari

Tata letak isi : Fitriana Hadi

Desain dan ilustrasi sampul : Ketjilbergerak, Arif Gunawan, Agus Teriyana

Cetakan pertama, Agustus 2020

xxxvi+148 hal., 13x19 cm

ISBN:

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



Pengantar Editor

*D*esa mawa cara, negara mawa tata 'tiap desa memiliki adat masing-masing, tiap negara mempunyai undang-undang dan peraturan yang mengatur tata kehidupan rakyatnya, yang berbeda satu sama lain'. Demikian Jawa memberikan *wewarah* tentang perbedaan-perbedaan cara setiap desa dan negara dalam mengatur kehidupannya. Berbeda desa, berbeda cara pengaturannya; berbeda daerah, berbeda pola hidupnya, berbeda kebiasaannya, bahkan berbeda bahasanya. Covid-19 memberi peluang bagi kita

untuk merefleksikan ulang tata cara dan pengetahuan leluhur yang hingga kini justru masih relevan untuk dilakukan. Gotong royong tampaknya menemukan kembali tempatnya. Hari-hari ini ketika persoalan pangan menjadi krusial, solidaritas dan kerja samalah yang menjadi tumpuan bagi mereka yang papa. Dan orang-orang kembali ke desa. Mengingat desa sebagai ibu.

Dalam alam kebudayaan desa, kejadian pagebluk semacam Covid-19 ini, sebelum ilmu kedokteran modern membentuknya (menafsirkan, memoles, dan memplotnya), mengaitkannya sebagai sebetuk “hukuman”. Muncullah ungkapan “*sapa nandur, ngundub*” ‘apa yang kita perbuat itulah yang kita tuai’. Di sinilah kemudian kontestasi penafsiran menemukan ruangannya. Perspektif budaya tradisional, yang erat kaitannya dengan mitos, menamakannya sebagai sebetuk “kualat” (buah dari kesombongan atau tindakan penyepelan). Dalam jagat pewayangan, suasana “*gara-gara*” sering dilukiskan sebagai sebuah kondisi di mana, selain terguncangnya tata nilai sekaligus tata kosmologis juga ditandai oleh adanya pagebluk: “*Para kawula ingkang ketaman sesakit, lara esuk sore mati ‘banyak orang tiba-tiba terserang penyakit, sakit di pagi hari mati di sore hari’.*”

Konsepsi *jagad cilik* (mikrokosmos) dan *jagad gedhe* (makrokosmos) yang bersifat *wengku-winengku* (saling menopang) atau bersifat korelatif, sering dijadikan penjelasan tentang rusaknya tata kosmologis. Seumpamanya kacaunya *jagad cilik* atau manusia yang berkaitan dengan sebuah tata nilai maka akan menyebabkan kacaunya pula *jagad gedhe* atau alam. Hal ini dapat dipahami mengingat di masa silam manusia tak pernah dikonstruksikan



berseberangan dengan alam. Namun, ia hidup dengan dan bersama alam, bukannya di luar sekaligus di dalam alam.

Maka ketika berhubungan dengan alam, *ilmu titen* menjadi penting. Kapan seorang pelaut harus melaut, kapan seorang petani harus menanam, kapan pernikahan harus dilangsungkan, dan seterusnya. Budaya-budaya itulah yang di era sekarang digeser dengan ukuran-ukuran yang sangat rasional dan meminggirkan *rasa-surasa*. Maka dalam situasi pandemik semacam ini ungkapan “barang siapa yang mencari kebahagiaan tanpa membahagiakan orang lain, layaknya sedang membuat tali untuk menjerat lehernya sendiri” semakin relevan. Dan hari ini masyarakat saling menguatkan: solidaritas pangan di mana-mana, donasi terus berlangsung, membeli barang di warung tetangga menguat, dan seterusnya. Gotong royong menjadi puncak relasi sosial dan budaya. Berbagi sumber pangan menjadi keharusan.

Dan lalu pertanian menjadi tempat kembali. Desa menemukan kembali relevansinya bagi Indonesia. Kaum muda berbondong-bondong mengolah tanah, orang kota menanam. Desa, pangan, dan pertanian adalah awal mula kebudayaan. Menanam adalah awal dari keberlanjutan hidup manusia. Dan seluruh siklus itu adalah bagian dari pembentukan kebudayaan yang kemudian membentuk pola produksi-konsumsi. “Untuk bertani tangan harus dingin, jika perlu bahkan harus bicara dengan tanaman,” begitulah mereka yang memuliakan budaya tani. Vandana Shiva, intelektual asal India menyebut di masa Covid-19 ini, ibu dari pengetahuan bukan lagi filsafat, tetapi menanam, bertani. Pengetahuan yang berarti di masa pandemi sekarang ini adalah bagaimana kita memakan apa yang kita



tanam. Setiap anak muda harus menyadari bahwa bekerja dengan menggunakan tangan, hati, dan pikiran sekaligus terkoneksi satu dengan lain adalah evolusi tertinggi dari spesies manusia. Ini yang membedakan kita—manusia—dengan binatang. Bekerja dengan menggunakan tangan bukan pekerjaan yang rendah, ini adalah pekerjaan yang nyata tentang kemanusiaan. Maka mulailah dengan menanam. Olahlah tanah untuk menanam makananmu sendiri, simpanlah benih, dan memasak. Karena di masa lalu aktivitas memasak yang dilakukan oleh ibu sering dianggap tidak sebagai sebuah pekerjaan. Namun, ia adalah alasan kita bisa *sustain* hingga hari ini. Belajar dari moyang untuk mengajari bagaimana cara memasak, membangun komunitas sebagai bagian dari keluarga yang ada di bumi, bukan semata sebagai produsen dan konsumen, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang mengolah pangan. Hari ini makanan menghubungkan kita dan itu menyingkirkan rasa takut pada kecurangan, ketidakjujuran, dan kecemasan. Itulah sesungguhnya kebebasan.

Dalam konteks itulah kita mengamini budaya kolektif telah menjadi pengikat bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam pola relasi sosial dengan berbagai istilah, seperti kongko dan nongkrong, *kenduren*, *kondangan*, *cakrukan*, memberi tanda masyarakat yang terus berkumpul. Salah satunya melalui tradisi makan bersama. Di Tanah Padang, tradisi ini disebut *bajamba*, Bali dengan *megibung* dan *ngeliwet* di beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sayangnya, di tengah pandemi Covid-19, imbauan *social/physical distancing* menjadi suatu tantangan tersendiri bagi perilaku masyarakat yang terbiasa melakukan aktivitas



bersama-sama. Berbagai usaha dilakukan agar mencegah kerumunan umum, seperti penggerebekan anak-anak muda yang nongkrong, hingga implementasi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Masyarakat juga perlu mengingat bahwa dalam kondisi seperti ini, kepedulian dan tenggang rasa harus semakin kuat. Budaya gotong royong tetap dapat dilakukan meskipun tidak seperti biasanya dalam kontak fisik. Bahkan, dalam pengertian yang dikutip dari Kendra Cherry, budaya kolektif tidak terkait dengan kontak fisik, tetapi merupakan tujuan bersama, “*Collectivistic cultures emphasize the needs and goals of the group as a whole over the needs and desires of each individual.*” Dalam pandemi ini, *budaya kolektif tidak seharusnya menjadi antitesis, melainkan adaptasi.*

Maka salah satu hal yang perlu didiskusikan dalam seri Kongres Kebudayaan Desa, pada sesi webinar ke-10 “Kebudayaan” ini adalah bagaimana menjelaskan kebiasaan hidup semacam ini dalam konteks kebudayaan. Budaya baru seperti apa yang akan lahir dari proses ini?

Dalam konteks kebudayaan dan seni, sesungguhnya menjadi tantangan menarik dalam dunia kreatif. Para pelaku budaya dan seni memiliki ruang yang menantang, sebagai olah kreativitas. Seorang pelaku kreatif tentu tak akan terhalang oleh krisis. Daya kreativitasnya di uji di era pandemik. Namun, tampaknya untuk saat ini masih terhitung sulit dan karenanya Ditjen Kebudayaan mendata sedikitnya ada 40.081 seniman terdampak Covid-19 karena pembatalan pertunjukan dan festival seni yang perlu dibantu.

Webinar Seri 10 tentang kebudayaan ini bermaksud membahas bagaimana kebudayaan di desa, era dan pasca-Covid-19. Ketika



kebiasaan bergeser, ketika kebosanan menjadi intim, ketika kecemasan menjadi teman sehari-hari, ketika jabat tangan tak lagi dilakukan, ketika silaturahmi tak lagi terjadi dengan pertemuan fisik, dan ketika rebahan begitu berarti dalam keberlangsungan bangsa. Beberapa pertanyaan yang bisa dipertajam untuk mencermati kondisi tata hidup dan kebudayaan kita hari ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana kebudayaan kita akan berubah menghadapi Covid-19 ini? Bentuk kebudayaan seperti apa yang kita imajinasikan? Model nilai dan praktik budaya seperti apa yang akan dituju oleh desa dan Indonesia pada umumnya?
2. Mungkinkah mereinterpretasi dan merekonstruksi budaya serta kekayaan nusantara menjadi bangunan baru kebudayaan kita di era pandemik dan sesudahnya?
3. Strategi kebudayaan seperti apa yang bisa kita bangun untuk tata hidup baru dan arah Indonesia baru, selama Covid-19 dan sesudahnya? Bagaimana teologi desa selama dan pascapandemi?
4. Bagaimana peran aktor-aktor budaya, budayawan, seniman, dan warga dalam menentukan arah kebudayaan di desa?
5. Dalam konteks pembangunan kebudayaan, kebijakan strategis apa yang bisa didorongkan untuk pemerintahan desa, membangun nilai dan praktik kebudayaan baru di era pandemik Covid-19 dan sesudahnya? Kebijakan strategis apa yang bisa mengakselerasi dunia seni di desa?
6. Program-program strategis apa yang bisa ditawarkan untuk pemerintah desa sebagai bahan pembangunan kebudayaan dan



kesenian selama Covid-19 dan sesudahnya? Bagaimana pula kegiatan yang bisa ditawarkan?

Dalam rangka itu pada Webinar Seri 10 Kongres Kebudayaan Desa 2020, hari kelima (dari rangkaian webinar seri 1 hingga seri 18, 1-10 Juli), pada Senin, 6 Juli 2020: 13.00 s.d. 16.00 WIB, bertempat di Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggunharjo, Yogyakarta, kami mengundang enam narasumber untuk memaparkan sumbang-gagasan mereka dengan tema:

“Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru”

1. Dr. Anwar Sanusi, Ph.D. (Sekjen Kemendesa)
2. Prof. Rachmi Diyah Larasati (University of Minnesota, Minneapolis)
3. Iman Budhi Santoso (Budayawan)
4. Nirwan Ahmad Arsuka (Pemerhati Budaya)
5. Irfan Afifi (Budayawan/Langgar.co)
6. Hairus Salim (LKIS)

Moderator: Lukman Solihin (Peneliti Litbang Kemendikbud)

Kami mendorong keenam narasumber di atas untuk menyampaikan sumbang-gagasan pada webinar tersebut dan juga meminta mereka untuk menuliskan gagasan mereka dalam bentuk *paper*, tulisan, ataupun makalah. Sebagian dari narasumber ini berkenan menulis makalah dan menyerahkan ke panitia, tetapi ada sebagian dengan alasan satu dan lain hal belum bisa menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Oleh karenanya kami



terpaksa merekam sumbang-gagasan mereka dalam bentuk *notulensi* yang kemudian kami olah menjadi tulisan yang utuh.

Buku ini merupakan hasil dari kumpulan antologi sumbang-gagasan tulisan para narasumber di acara webinar di atas, baik dari makalah yang mereka tuliskan sendiri, maupun tulisan yang bisa kita rekam dari webinar seri ke-10 pada tema “Kebudayaan” dari rangkaian Kongres Kebudayaan Desa 2020. Semoga tulisan-tulisan yang terekam maupun tertulis pada rangkaian webinar Kongres Kebudayaan Desa, yang telah menjadi kesatuan buku yang Anda pegang ini, bisa memberi sumbang-gagasan atas Arah Tatanan Baru Indonesia yang berangkat dari desa dalam mengeja Indonesia, terutama setelah peristiwa pandemik Covid-19 yang bukan hanya melanda bangsa ini melainkan juga melanda dunia secara keseluruhan. Terakhir, selamat membaca.

Kampoeng Mataraman, 18 Juli 2020





Sekapur Sirih

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “*Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata*”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa

di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No. 13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkat statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefleksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati. Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.



Di situlah kini desa berada, yang berimbis pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Comte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah



dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaringan pengamanan sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Selebihnya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus



mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam*.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Hamengku Buwono X
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





Sekapur Sirih

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Melawan korupsi dari desa

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian



menular. Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.



Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Giri Suprardiono

Direktur Dikyanmas KPK





Sekapur Sirih

Menteri Desa, PDTT

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana

perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau holopis kuntul baris, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif



yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain, di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini problem solving yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. Tagline “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan



lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggungharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, PDTT





Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera
bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.*

Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan

cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

Pertama, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing, lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

Kedua, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk



revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan



dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah, tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya



tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik.



Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retorik, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang. Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan



mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut science mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan, sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung



fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam.

Jakarta, 1 Juli, 2020

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





Daftar Isi

Pengantar Editor..... v

Sekapur Sirih

1. Gubernur DIY xiii

Hamengku Buwono X

2. Direktur Dikyanmas KPK..... xvii

Giri Suprapdiono

3. Menteri Desa, PDTT..... xxii

Abdul Halim Iskandar

Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan,

Kemendikbud xxvi

Dr. Hilmar Farid

Memajukan Kebudayaan Desa: Membangun

Pemerintahan Kosmopolitan..... 1

Anwar Sanusi, Ph.D.

Pandemik dan Pencuri Masa Depan: Perjalanan

Narasi Tanah dan Resistensi Desa..... 11

Rachmi Diyah Larasati

Nusantara Mengajar..... 34

Iman Budhi Santosa

Wabah Terkembang Jadi Guru: Catatan Seorang

Relawan Literasi 63

Nirwan Ahmad Arsuka

Desa: Problem Pengetahuandan Kebudayaan..... 74

Irfan Afifi

Teologi Desa: Sebuah Tawaran Wacana..... 103

Hairus Salim HS



Epilog	113
Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020	
Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa.....	141
Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020.....	144



Memajukan Kebudayaan Desa: Membangun Pemerintahan Kosmopolitan¹

Anwar Sanusi, Ph.D.

(Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi)

Dalam memajukan sebuah kebudayaan desa, ada banyak variabel kunci yang harus berperan di dalamnya. Salah satu yang paling penting dan bisa jadi memengaruhi banyak variabel lain adalah perkara pemerintahan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengawal Undang-Undang Desa dengan sungguh-sungguh.

¹ Tulisan ini disarikan dari materi yang disampaikan Anwar Sanusi dalam acara Webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Seri 10 di hari kelima (dari rangkaian webinar seri 1 hingga seri 18, 1-10 Juli), pada Senin, 6 Juli 2020: 13.00 s.d. 16.00 WIB. Tulisan ini dirangkaikan oleh **Rofi Ali Majid**.

Mengapa Undang-Undang Desa dan apa kaitannya dengan kebudayaan di desa? Secara implisit, di dalam Undang-Undang Desa tercantum berbagai tujuan utama yang mulia, yakni bagaimana menguatkan, memberikan pengakuan terkait eksistensi nilai-nilai yang ada di pedesaan, untuk kemudian bisa diangkat dan menjadi bagian penting dalam mengonstruksi tata kelola pemerintahan. Konstruksi tersebut diharapkan terjadi di tingkat desa dan nantinya akan memberikan dampak yang lebih besar di tingkat nasional.

Upaya untuk mewujudkan hal di atas dimanifestasikan dengan pemberian wewenang kepada setiap desa untuk mengatur dan mengurus urusan desa secara mandiri. Dalam hal ini, desa juga berhak mengelola dan memperoleh sumber-sumber pendapatan mandiri. Kebijakan tersebut memiliki potensi dan risiko yang cukup besar, yakni kian majunya kebudayaan di desa, atau malah berbalik memicu terjadinya sebuah involusi pada kebudayaan desa.

Kemajuan kebudayaan desa ditandai dengan adanya cipta, rasa, karsa, dan karya, baik dari pemerintah maupun masyarakat desa yang tumbuh berkembang selaras dengan gerak zaman. Kemajuan kebudayaan tersebut bertumpu pada kreativitas, inovasi, sikap terbuka, *inklusivitas*, kesetaraan, keswadayaan, dan gotong royong, serta kolaborasi juga jejaring yang luas. Dengan diaplikasikannya hal-hal tersebut maka desa akan tumbuh menjadi tangguh dalam menghadapi setiap krisis peradaban.

Sebaliknya, kebijakan di atas bisa juga berbuah pada involusi budaya yang ditandai dengan adanya kerumitan masalah internal, seperti *money politic*, *elite capture*, serta peran warga yang terbatas.



Hal lain yang biasanya juga muncul adalah mentalitas *silo*, di mana pemerintah desa dan warga merasa mampu mengembangkan potensi desanya tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Dalam hal ini, pemimpin desa dan masyarakat menutup diri dan enggan berbagi informasi dengan pihak luar, sehingga menghambat kolaborasi antar-*stakeholder*. Adanya kejadian macam ini muncul karena rendahnya kemampuan adaptasi pemimpin desa dan masyarakat dalam menghadapi setiap perubahan. Apabila hal-hal di atas terjadi maka desa akan menjadi rapuh ketika diterpa krisis peradaban.

Untuk menghindari risiko tersebut, dibutuhkan kehadiran pemerintah yang memegang konsep *cosmopolitan governance*, yakni konsep pengelolaan tata pemerintahan yang berorientasi pada penemuan nilai-nilai yang bisa diterima secara universal. Kita harus sudi untuk menapak jejak dan menggali ke masa lampau, sebab masyarakat Indonesia telah memiliki catatan yang sangat panjang terkait dengan tata kelola pemerintahan, di mana hal tersebut memberikan kontribusi bagi terbentuknya tata dunia global.

Secara umum kita dapat membagi sistem pemerintahan di Indonesia menjadi tiga periode, yakni masa pemerintahan Majapahit (1293-1500), pemerintahan kolonial (1602-1942), dan pemerintahan Republik Indonesia (1945-sekarang). Majapahit memiliki masa pemerintahan yang panjang, di mana tata pemerintahannya begitu baik. Pada waktu itu, tata pemerintahan Majapahit telah mengandalkan struktur birokrasi yang kompleks dan detail. Sebagai contoh, semua akan dilakukan dengan detail soal siapa yang menjadi penanggung jawab dan yang bertanggung jawab—dan kelak, konsep demikian dirumuskan oleh seorang ahli administrasi



publik yang kondang, Max Weber—di kemudian terkenal dengan ciri khas birokrasinya yang hierarkis.

Kalau kita jeli melihat, sebenarnya apa yang dilakukan Majapahit betul-betul inspiratif. Tanpa mengenal Max Weber, Majapahit telah memiliki basis *role model* yang dapat menjamin pemerintahan berjalan dengan efektif, serta dapat mengelola segala urusan dengan baik. Hal ini berbuah pada kedigdayaan yang di kemudian hari Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan paling berjaya di Nusantara.

Sekian waktu kemudian pemerintahan di Nusantara beralih ke masa kolonialisme, di mana Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) berperan cukup vital dalam sistem pemerintahan. Pada masa itu pemerintahan memiliki fondasi yang cukup kuat, tetapi birokrasinya diwarnai dengan kepentingan bisnis sehingga banyak merugikan rakyat. Hal ini tak bisa dilepaskan dari eksistensi VOC sebagai perusahaan dagang.

Beralih ke masa pascakemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia—yang dimulai sejak 1945—seperti kehilangan arah, sebelum akhirnya terjebak pada konsep *good governance* dan *new public management*. Dalam penerapannya, konsep ini bermasalah dan memiliki berbagai macam kontradiksi. *Good governance* misalnya, menerapkan sesuatu secara hegemonik dan seragam, oleh karena itu tak perlu kaget jika ada penyeragaman dalam berbagai hal di Indonesia, mulai dari pangan hingga perkara pendidikan. Ini disebabkan oleh konsep *good governance* yang cenderung terkesan



dilakukan secara paksa, serta mengabaikan aktor global atau dunia internasional.

New public management juga memiliki kontradiksi sebab pada konsepnya ia mengadopsi prinsip manajemen sektor privat ke sektor publik. Dalam hal ini, *new public management* mengonsepsi birokrasi sebagai wirausaha, sehingga logika yang digunakan dalam pemerintahan menjadi berorientasi pada pasar. Padahal idealnya, negara harus menjadi pelayan publik, bukan pelayan pasar. Atas beberapa kontradiksi tersebut maka negara harus merumuskan sebuah konsep baru yang relevan.

Pemerintah harus menawarkan formulasi yang di dalamnya terdapat komitmen dan keterikatan kuat antara negara dengan masyarakat (*engaged citizenship*). Untuk itu setidaknya ada tiga hal yang perlu dipahami dan diperhatikan. *Pertama*, kekuatan internasional; *kedua*, faktor budaya lokal; dan *ketiga*, aspek konstitusi dalam pengelolaan pemerintah. Apabila melibatkan ketiga hal di atas maka tidak sukar untuk mewujudkan formulasi yang berbasis pada keterikatan antara negara dengan masyarakat. Hal lain yang tak kalah penting yakni meletakkan fokus perhatian pada prinsip-prinsip di mana penyediaan layanan publik dan sistem layanan publik diolah sebagai satu kesatuan, berdasar pada teori-teori kelembagaan dan jejaring.

Maka penting kiranya bagi kita untuk kembali ke pembahasan mengenai *cosmopolitan governance*, di mana pemerintah berusaha untuk menggali nilai-nilai universal yang ada di masyarakat. Universalitas penting sebab di sana terdapat unsur-unsur



kemanusiaan. Mengutip Abdurrahman Wahid soal universalitas pemerintahan dan sistem politik, “Masalah-masalah publik yang dihadapi, seperti kemiskinan, korupsi, pencemaran lingkungan, dan sebagainya, menuntut kehadiran pemerintah yang berdasarkan hukum, persamaan derajat, dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan pandangan—unsur utama kemanusiaan.”

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan memiliki warisan panjang serta variatif. Melihat konteks desa, Indonesia sangat luar biasa, sebab desa-desa di Indonesia memiliki tata kelola spesifik yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain, baik dari nomenklatur wilayah maupun jabatan. Sebagai contoh ada berbagai macam nomenklatur seperti *nagari*, distrik, desa, kampung, kelurahan, dan lain-lain. Untuk penyebutan pejabat pun, ada keragaman nomenklatur, seperti lurah, kepala desa, wali nagari, dan sebagainya. Semua ini adalah semacam pesan tersirat bahwa kita memiliki banyak referensi terkait konsep-konsep pemerintahan.

Untuk itulah Undang-Undang Desa hadir dengan prinsip *recognisi*, memberi pijakan utama bagi pemerintah negara untuk mengakui adanya nilai-nilai universal dari bawah, di mana setelah menyebar diharapkan menjadi kosmopolitan dan memberi kebermanfaatannya. Kebermanfaatannya tersebut menjadi indikator penilaian bagi terlaksanakannya pemerintahan kosmopolitan.

Setidaknya ada lima indikator tegaknya prinsip *cosmopolitan governance*. *Pertama*, adanya keselamatan fisik masyarakat dari tindakan di luar hukum. *Kedua*, adanya keselamatan bagi masyarakat dalam berkeyakinan dan tentu tak ada paksaan. *Ketiga*, adanya



keselamatan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. *Keempat*, adanya keselamatan kepemilikan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum. *Kelima*, adanya keselamatan dalam menjalankan profesi. Apabila lima indikator tersebut sudah terlaksana maka bisa dikatakan bahwa *cosmopolitan governance* telah terlaksana dengan baik.

Cosmopolitan governance diharapkan dapat diaplikasikan di tingkat pemerintahan desa dengan ciri khas sebagai berikut:

1. Tata kelola desa adaptif terhadap perubahan peradaban, dikarenakan nilai-nilai kemanusiaan universal dihayati dan dipraktikkan oleh pemimpin serta warga desa.
2. Kondisi kehidupan dan penghidupan di desa ditopang oleh kebiasaan, adat, dan etika masyarakatnya yang dipelihara dan ditumbuhkan melalui kesadaran serta penghormatan yang tinggi dari pemimpin dan warga desa terhadap kebudayaan.
3. Pemimpin dan warga desa memiliki kemampuan mencari titik temu norma–norma dan nilai-nilai bersama berbekal sikap saling memercayai satu dengan lainnya. Titik temu etis-normatif menjadi tali pengikat solidaritas sosial di desa.
4. Adanya nilai-nilai inklusi sosial (toleransi, kesetaraan, solidaritas, moderat, bela rasa sosial, gotong royong, kedamaian, menghargai keragaman umat manusia, dan lain-lain) menyatu dalam cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh warga desa.
5. Interaksi sosial yang harmonis dan berkeadilan antara pemimpin desa dengan warganya, sehingga tercipta keseimbangan dan kesatuan dalam situasi masyarakat desa yang *bhineka*.



6. Desa mampu menghadapi krisis beradaptasi secara inovatif dan kreatif dengan bertumpu pada partisipasi warga desa (*engaged citizenship*).
7. Desa mampu berkolaborasi aktif dengan desa lain dan/atau *stakeholder* lainnya dalam menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya desa.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang kosmopolitan maka diperlukan langkah konkret dan taktis. Dalam hal ini beberapa upaya yang kami lakukan adalah dengan menyusun regulasi/peraturan tentang desa yang runtut dengan mandat Undang-Undang Desa sebagai landasan hukum pemerintahan desa yang kosmopolitan. Selain itu, penting untuk melacak secara historis adat dan budaya desa sebagai warisan budaya Nusantara yang memuat nilai-nilai kosmopolitan: terbuka, toleran, moderat, dan menghargai keragaman umat manusia.

Beberapa upaya konkret lain juga dilakukan. *Pertama*, mendokumentasikan sejarah kebudayaan desa yang memuat beragam hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berkaitan pemerintahan desa yang memuat nilai-nilai kosmopolitan. *Kedua*, menyelenggarakan musyawarah kebudayaan desa untuk membahas dan menyepakati arah kebijakan pemajuan kebudayaan kosmopolitan sebagai identitas budaya desa.

Ketiga, merumuskan dan menetapkan peraturan desa tentang pemajuan kebudayaan desa yang di dalamnya memuat pengaturan tentang pemerintahan desa yang berwatak kosmopolitan. *Keempat*, menyelenggarakan secara berkelanjutan pemerintahan desa berwatak



terbuka, lintas budaya; desa yang dikelola secara kritis, progresif, dan visioner. *Kelima*, menumbuhkan beragam kerja sama antardesa maupun kerja sama desa dengan berbagai *stakeholder* yang dilandasi sikap saling menghormati dan berkesetaraan.

Keenam, menumbuhkan dan mengembangkan desa-desa sebagai pusat pengetahuan dan rujukan keunggulan pemerintahan kosmopolitan. *Ketujuh*, menerapkan pengembangan kapasitas literasi kebudayaan/peradaban yang berbasis platform digital (Akademi Desa 4.0., Go Desa, Desa Smart). *Kedelapan*, mempromosikan dan mereplikasi beragam *good practices* pemerintahan desa kosmopolitan untuk diadopsi dan diadaptasikan di berbagai desa yang ada di Indonesia. Serta terakhir yang tak kalah penting adalah membangun jaringan kerja sama dan kemitraan lintas *stakeholder* untuk berkolaborasi memfasilitasi terbentuknya pemerintahan desa yang bersifat kosmopolitan.

Hal yang harus digarisbawahi dari upaya ini adalah kami tidak pernah bermaksud untuk menjadikan desa sebagai wilayah urban, melainkan berharap terwujudnya kondisi pemerintahan desa yang tetap memegang nilai-nilai lokal, tetapi tetap terbuka pada setiap perubahan yang ada. Dengan upaya-upaya di atas, diharapkan kebudayaan setiap desa di Indonesia dapat maju dan berkembang ke arah yang lebih baik.



Profil Narasumber

Anwar Sanusi, Ph.D. Kariernya fokus pada dunia aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, komitmennya untuk membangun desa juga tak lepas dari pengembangan struktur di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satunya berupa pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) pada tahun 2015. Tujuannya untuk mengakomodasi kepentingan pengembangan desa dengan corak tertentu. Seperti desa di daerah rawan bencana, pascakonflik, serta desa di pulau kecil dan perbatasan.

Gagasannya banyak ia tuangkan dalam jurnal dan buku. Di antaranya “Institutional Arrangement and Policy for Improving Competitiveness and Innovation in Local Government Investment” dan “Evaluasi Kebijakan dalam Upaya Peningkatan Mutu Human Capital di Sektor Publik (*Comparative Study* dengan Australia)”. Lalu “Kajian Kelembagaan Penataan Lembaga Nonstruktural: Eksistensi, Urgensi, dan Peran”, serta “Bunga Rampai Kajian Kelembagaan Quo Vadis Kelembagaan Kecamatan di Era Otonomi Daerah”.

Kini Anwar Sanusi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Amanah tersebut diembannya sejak 2015. Sebelumnya, di tahun 1994, ia meniti karier di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi–Lembaga Administrasi Negara (STIA–LAN) hingga menjadi Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan Sumber Daya Aparatur Kelembagaan LAN.





Pandemik dan Pencuri Masa Depan: Perjalanan Narasi Tanah dan Resistensi Desa

Rachmi Diyah Larasati

Di awal Maret 2020, berita resmi munculnya pasien Covid-19 mulai dirilis di media nasional Indonesia. Saat itu saya baru saja mendarat di Jakarta dan mulai melihat kepanikan dari sekitar, baik secara wacana maupun dari respons di tingkat kebijakan lokal dan nasional, termasuk pemborongan bahan makanan di toko juga *supermarket* dari berbagai tingkat kelas ekonomi. Di Yogya, belum

ada pernyataan resmi sampai sekitar tengah Maret perihal keberadaan korban dari pandemik Covid-19. Dimulai dengan contoh kasus pasien di Rumah Sakit Sardjito dan pengambilan tes *contact tracing* dari para peserta sebuah pertemuan dari kampus Universitas Gadjah Mada, akhirnya Yogyakarta juga mengalami penanda-penanda penamaan penyebaran virus dan aturan hubungan sosial mulai diberlakukan dengan mengacu aturan internasional (WHO) tentang penyakit tersebut.

Pada saat itu, Oemah Larasati di Dusun Semail masih sibuk menyusun rencana kerja sama pendidikan pemikiran *dekolonial* dalam konteks regenerasi pola pikir bagi anak-anak, artinya bagaimana tetap berada di desa, tetapi tidak dianggap “liyan” atau “*ndeso*” oleh kota dan negara, maupun juga tidak dianggap “liyan” secara global maupun nasional. Bahkan kelas pagi itu di Oemah Larasati merespons berita kedatangan keluarga kerajaan Belanda di Indonesia dan wacana *permintaan maaf*: sebagai penanda legasi relasi kolonial dengan sebuah kurikulum berjudul: “Maling”.

Kurikulum ini, di Oemah Larasati, hari itu juga memunculkan diskusi dengan menyorongkan konsep “maling” atau “*thief*” dalam hubungannya dengan *coloniality* di kehidupan desa. Masuknya permainan sistem lokal mafia tanah dan permainan kepemimpinan (lokal desa dan pejabat tanah) dalam memutuskan lahan mana yang bisa berubah menjadi bangunan dan dikuasai, sebagai bagian dari metode aliran-aliran tertentu dalam keagamaan dan juga bentuk imajinasi modernitas *real estate* di kampung, atau meminjam iklan mereka: “Rumah Kota Rasa Desa Indah.”



Murid-murid yang berumur 7-13 tahun sibuk membuat komposisi tari dan drama kecil tentang maling (“Kancil Nyolong Temon”) dengan sebuah latihan menandai kepemilikan (sendiri atau privat) dan kepemilikan bersama komunal, dan komposisi tari ini memberi ruang latihan kolektif dan respons kewaspadaan. Sebagai penyiap kurikulum dari mata pelajaran, saya berharap mengenalkan proses regenerasi cara pikir terhadap pergeseran fungsi lahan tani, baik itu berkait perumahan seharga minimal 900 juta di RT di sebelah kami (sangat rendah kualitas analisis dampak lingkungannya), maupun juga memikirkan tumpukan sampah dari aliran yang melewati tak hanya sawah-sawah, tetapi juga perumahan dan sekolahan baru dari Desa Ngoto. Hari itu kelas ditutup dengan mata pelajaran gobak sodor dan cublak cublak suweng sebagai latihan strategi membaca batas garis dan kesiapan menyambut maling tanpa kekerasan dengan bergandengan tangan (pengambilan ruang dan barang yang tak dibayangkan), yakni tanpa emosional kekerasan dengan teknik tari bergandengan tangan karena merasa desa adalah milik mereka secara komunal dan patut dijaga bersama; jika dalam lompatan itu mereka tak jatuh dan tak melewati batas garis (saya sebut ruang pribadi dan bukan publik), saya sebagai guru berkewajiban memberi hadiah, misalnya menceritakan tentang ruang bayangan dunia asing yang sering kali anak-anak sangat tertarik (Amerika, Jepang, Korea, Inggris).

Cerita pertama yang saya berikan adalah dongeng “Kepulauan Tentara”—merujuk pada rencana penarikan pasukan NATO di zona konflik Afghanistan beserta munculnya kerja sama baru bagi Amerika dan Taliban; juga terkait apa itu Taliban dan kemungkinan



pengajaran keagamaan mereka, serta cerita anak-anak di Afghanistan yang tak bisa menari lagi. Cerita kedua adalah tentang penyakit baru bernama Corona yang datangnya seperti maling lahan sawah atau tanah di mana kita harus siap karena mengancam perorangan secara tiba-tiba dan tak terencana maka harus disiap dengan respons komunal walaupun beritanya tanpa kepastian apa dan bagaimana—merujuk pada pandemik baru berdasar pengumuman resmi WHO yang menyatakan bahwa *coronavirus disease* Covid-19 disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2).

Hari itu, pada sore hari, anak-anak di Oemah Larasati belajar untuk mengingat secara sederhana latihan memperhatikan lebih detail terkait kebersihan tangan dan penggunaan air, berimajinasi melalui komposisi tari tentang konsep ketubuhan bersifat *waspada*, misalnya getah daun yang bisa melukai layaknya Covid-19, seperti maling pencuri tanah dan lahan padi yang datangnya sekali lagi tak bisa dibaca dan dilihat dengan mata. Cerita silang ini menjadi bagian pengajaran tari dan drama kecil kurikulum dalam merespons tata pangan dan alam juga Covid-19.

I. Desa dalam Strategi Hubungan Global: Sebuah Kurikulum Rumah Budaya

Sedikit pengantar tersebut di atas akan saya pakai untuk memetakan bagaimana alat desa berupa “rumah budaya” bernarasi tentang Covid-19 dan pencegahannya yang telah ditangani secara memusat dalam hubungannya dengan wacana internasional global,



tetapi telah terbukti dengan segala peran serta warga, desa mampu mendekonstruksinya secara lokal agar translasi pemahaman tidak berakibat meminggirkan serta mengatasi jarak bahasa sebagai ruang lahirnya kembali diskriminasi. WHO (badan *assembly*) menentukan istilah dan saran pencegahannya, menentukan protokoler semua hal yang termaktub dalam memahami Covid-19 sebagai pandemik, termasuk pengurusan jenazah jika terdapat pasien yang meninggal maupun melaporkan, tetapi yang dikhawatirkan adalah juga lingkaran kontak yang dimungkinkan berlipat gandanya virus dari sebuah kerumunan komunal.

Oemah Larasati yang berada di Dusun Semail Bangunhardjo menjembatani dua pola kehidupan desa dan batas urban pinggiran Kota Yogyakarta. Covid-19 menandai secara jelas bagaimana tingkat kemapanan ekonomi dan kemampuan menggunakan sistem digital, ketersediaan virtual, dan media daring di sekitar komunalnya begitu menjadi tumpuan utama secara mendadak dan bahkan ikut merombak ruang sosial secara cepat dan melempar beberapa warga menjadi tak berpenghasilan. Selain itu, Covid-19 juga menandai ketidakpahaman akan bahasa medis kesehatan global yang berasal dari luar. Oleh karena itu, muncullah gotong royong pemuda-pemudi di sekitar Oemah Larasati untuk mencoba membangun ruang partisipasi *ekonomik* (yakni grup “pemuda disinfektan” melakukan penyemprotan dan grup pemuda penyiapan makanan tradisional—*base of action-gendered*).

Maka, seperti yang disampaikan oleh Dr. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan dalam pidato pembukaan kongres ini menyatakan bahkan penggunaan bahasa dan istilah untuk referensi dalam konteks



Pandemik Covid-19 ini menyiratkan bahwa semua kebijakan hanya merunut sentralisasi penanganan berdasar epistemologi bahasa asing (Inggris), juga menyiratkan sentralisasi wacana global yang mengundang kita untuk merujuk kembali pada tingkat pengetahuan lokal yang justru pada saat seperti ini dipertaruhkan peran dan kegunaannya. Istilah-istilah seperti *lock down*, *quarantine*, *social (physical) distancing*, *new normal*, dan bahkan *sanitizing*, sebuah cara membersihkan, baik *hand sanitizer* atau bahkan penyemprotan rumah dengan pembersihan yang menggunakan atribut eksterior *disinfectan*, misalnya—menjadi kosakata bahasa relawan desa—secara ketubuhan dinarasikan untuk “menjadi bersih virus” sebagai wacana baru yang mendekati pemusnahan mikro-organisme yang berjarak dengan budaya lokal. Menormalkan industri medis—disinfectan yang biasanya untuk membunuh mikroorganisme di rumah sakit atau pembuangan limbah—dan mikropolitik wacana “anti penyakit” dalam keruangan desa yang mendadak secara bahasa menyeret paksa kehidupan desa dalam tataran komoditas baru. Pemahaman bahasa dan penerjemahannya menjadi kendala baru yang sertamerta harus dihadapi. Daya beli masyarakat terhadap material komoditas medis tersebut atas nama pencegahan penyebaran virus menjadikan masyarakat desa tertinggalkan kembali layaknya wacana pembangunan modern karena kecepatan penyebaran Covid-19 yang dinyatakan tak terbendung.

Tuntutan baru bagi warga desa untuk memenuhi kebutuhan yang bereferensi industri medis tersebut menjadi gaya baru prioritas dalam budaya keseharian desa dan modernitas wajah baru yang memaksa menjadi pilihan yang tak terelakkan bahkan mungkin



juga terkait ketetapan tatanan baru selama pandemik. Tentu ini juga belum ditambah dengan kerumitan alat komunikasi berbasis kuota data internet sebagai teknologi komunikasi yang mendadak dihadirkan seperti layaknya normalisasi gaya hidup. Mekanisme global ini menjadi lokal¹ dan persis seperti sebuah ideologi terpimpin secara kontrol, yakni dalam hal memandang desa sebagai entitas birokratis dalam ketidakpastian

2. Pandemi: Datangnya seperti Pencuri Tanah dan Pencuri Padi

Dalam ilmu ekonomi politik budaya, kita mengenal istilah industrialisme, atau terkait bagaimana kapitalisme bertindak dalam ruang *intimacy* tidak saja mengubah cara pengorganisasian dari kebutuhan yang terkesan “modern” dan “kota”, atau mereproduksi jarak gaya hidup menjadi standardisasi tuntutan kesehatan sehingga keberbedaan keseharian seolah terhilangkan. Seperti misalnya penggunaan kata *work from home* tentu bagi para petani dan pedagang sembako adalah hal yang absurd. Begitu juga dengan para seniman yang biasa *manggung* dengan konsep pemanggungan, baik yang sederhana maupun profesional. Memikirkan menjembatani kebutuhan hal-hal tersebut dan juga kesinambungan strategi—bukan hanya sebagai penyelesaian darurat sementara—sangatlah dibutuhkan. Maka saya dukung kongres desa yang—paling tidak—bersumber dan didasarkan pada semangat kekuatan desa

1 Miyoshi, Masao (1993, 79) berpendapat bahwa mekanisme globalisasi itu seperti dunia kolonialisme. Juga tataran kompleks kerumitan birokrasi desa saya melihatnya dalam bandingan John Pemberton, *On the Subject of Java*, Cornel UP (1994); Kahin in “Supra Note-17”.



dan semangat nilai budaya bersama untuk berposisi lebih seimbang dalam pemenuhan kebutuhan dan semaksimal mungkin mengurangi ketergantungan pada simbol-simbol modernitas urban industri yang telah menunjukkan secara nyata kegagalannya selama ini dan bahkan terjelaskan kembali dalam konteks Covid-19 ini. Ketergantungan pada hal-hal produksi di luar *kefamilieran* desa akan menimbulkan kerentanan baru, baik proses peminggiran kelas ekonomi atas ketidakmampuan rakyat dan juga “status quo” daya kreativitas yang menjadi bagian dari kehidupan warga.² Tentu kita ingat dampak lain yang patut dirujuk bagaimana konteks *contact tracing* bukan alasan cara-cara fasisme diterapkan dalam konteks desa.³

Melihat topografi kerentanan inilah yang mendasari pemikiran saya bahwa ketahanan pangan dan kemandirian dari lingkaran ketidakpastian, baik secara wacana, kebijakan, maupun juga cara menerjemahkan sisi medis sebagai hal utama dan prioritas dalam merespons pandemik, patut dipikirkan bersama. Hal besar ini tentu tidak akan bisa diselesaikan layaknya rantai sepeda yang telah putus, artinya setelah berjalan keliling kota tiba-tiba dipotong untuk tak melaju di desa. Untuk itu saya akan mengambil posisi kecil bagaimana kesenian sebagai hasil pola pikir—dan dalam hal ini termasuk regenerasinya di masyarakat desa—meregenerasi pesan dan makna dalam rangka kesiapan semasa pandemi dan masa baru

-
- 2 Saya merujuk ke Da Costa, Dia (2016) tentang kreativitas dan industri serta banyak juga para pakar mengusung ide ini dalam konteks pengembangan desa, lalu saya kembangkan pemikiran ini lebih pada penumbuhan daya kreatif manusia dengan mengacu janji negara bahwa kreasi seni juga diruangkan untuk pemenuhan kebutuhan yang menghormati. Infrastruktur didedikasikan pada hak akses.
 - 3 Merujuk tulisan Degung Santikarma, “The Model Militia”, *Inside Indonesia* (2013), tentang maling di Desa Bali.



dan setelahnya sebagai tatanan yang berkelanjutan.⁴ Jadi, meminjam istilah pakar desa adat, Ndlovu⁵, kita tidak sedang “manggung” (*performing village*) soal desa, melainkan sebagai sebuah janji dengan segala konsekuensi tindakannya dan kebertanggungjawabannya (seperti manifesto).⁶ Untuk itu, Covid-19 sebagai bahasa baru perlu didudukkan sebagai peristiwa modern atau sebagai dampak modernisasi. Atau dengan merujuk simbol modernitas dan pengaruhnya di dalam keruangan yang melahirkan ancaman kolektif dan respons kolektif dalam merunut kesejarahan perjalanan fungsi desa dan tentu mencakup lahan tanah dan ketahanan pangannya.

Saya akan meminjam kasus Bantul Yogyakarta misalnya, yakni untuk melihat bagaimana kesejarahan pengambilan ruang pangan menjadi ruang sewa industri (contohnya kebun tebu dan pabrik gula Madukismo) dan bagaimana lenyapnya lahan yang tersewakan tersebut memengaruhi penghasilan dan juga proses kreativitas tani dalam keseharian, juga termasuk dampak para pekerja yang dirumahkan (artinya tidak lagi pergi ke sawah)—alias dari sebelumnya bekerja di lahan persawahan berubah menjadi, misalnya, ke membuka toko kelontong. Tentu ini tidak bisa digolongkan seperti karantina kesehatan, melainkan semacam karantina pola produksi di mana terjadi perubahan partisipasi terutama perempuan secara

4 Berpikir secara dekolonisasi adalah bagaimana kita melihat pemenuhan kebutuhan dan strategi tanpa terjebak ke sentralisasi kebijakan global yang akan membangun wacana ketergantungan dan peminggiran baru. Contoh produk teknologi untuk kesehatan: *sanitizer* atau *wet tissue* masuk desa secara masif selama pandemik. Dekolonisasi juga mengundang kita berpikir bahwa bahwa desa bukan ruang gudang logistik kota.

5 Ndlovu, Morgan (2019). *Performing Indigeneity: Spectacle of Culture and Identity in Coloniality*.

6 Saya terinspirasi oleh tulisan Perley, Bernard. “Living Traditions: A Manifesto for Critical Indigeneity” (pp. 32-54) di Graham, R Laura & Penny, H. Glenn. *Performing Indigeneity: Global Histories and Contemporary Experiences*.



publik yang memberi peringatan bahwa pandemik ini berdampak pada hal-hal yang sebagian besar masyarakat mengenalnya dan mengalaminya. Atau fenomena lain, setelah menerima uang sewa tanah, pihak pemilik sawah menjadi buruh pabrik di kota atau penjaga toko swalayan, yang ini tentu tidak membentuk karantina, tetapi mendorong sebuah perubahan sosial ekonomi kelas dan kedekatan dengan nilai modernitas yang sebetulnya juga kurang lekat secara ketubuhan. Jadi, perubahan gaya pencaharian hidup dalam kehidupan desa juga sudah sering dialami⁷, tetapi—sekali lagi—sisi penyamarataan kondisi atau saya menyebutnya universalisme seolah melesat tanpa garis batas ras dan kelas yang diberlakukan di dalam konteks Covid-19 ini.⁸ Ini tentu yang perlu kita cermati bersama.

Dari pemaparan di atas, kreativitas masyarakat terkait pencegahan pengaruh pandemik tentu berbeda dengan konteks Covid-19 karena sifat mengglobalnya. Kita tidak merasa layak untuk mempertanyakan, misalnya, kenapa *sanitizing*, atau budaya baru penggunaan *tissue* atau *gel* dalam konteks pencegahan penyebaran virus dibahasakan sebagai *urgency*. Mengingat dalam sejarah sudah dibuktikan bahwa penyamarataan keadaan jarang memunculkan daya tahan itu sendiri dalam konteks keseharian melainkan justru menjadi beban standardisasi. Maka saya berargumen dalam segala ketidakpastian tentang Covid-19 ini bahwa ada semacam ruang kebebasan desa dan penghidupan kembali tradisi yang menjembatani

7 Tersampaikan di Friksi (Ana Tsing, *Friction: an Ethnography of Global Connection*, Princeton, 2005) dan Li, Tania, "To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations" in An Topode, 2010.

8 Contoh-contoh kasus di daerah lain juga banyak terjadi, misalnya Freeport di Papua, Exxon di Aceh, Starbuck di Jawa Barat, pabrik semen di Kendheng.



ruang kreatif interpretasi sekitar dan penguatan pangan sebagai metode utama.

Untuk itulah saya menyambut undangan panitia dalam *meranahkan* pikiran budaya dan ketahanan pangan yang tak seharusnya tergantung pada pasar industri yang tersentralkan secara global melainkan memperkaya produksi lokal dalam—hal ini pertanian—dan juga *menstrategiskan* daya produksi guna pemenuhan kebutuhan dalam lingkaran desa dan bahkan dilebarkan jangkauannya sebagai mata rantai produktivitas dengan tidak mendudukkan partisipasi sebagai hal yang *terendahkan* dalam sebuah adaptasi tatanan baru.

Izinkanlah saya menggunakan contoh nyata, misalnya tiga gadis remaja penari dan sinden dari desa di Pacitan yang memilih menjadi pelayan toko elektronik di Yogyakarta selatan dengan gaji yang sangat rendah dan kondisi tempat tinggalnya (indekos) yang tak layak selama pandemik⁹. Ketercerabutan ruang komunal dan akar budaya inilah dalam konteks kesehatan ataupun keberlangsungan ketahanan pangan tak bersambut secara taktik.

-

Berdasar hal ini, atas permintaan panitia, saya memikirkan bentuk kesenian seperti apakah yang berguna dan menurunkan ilmu secara *regeneratif* dalam konteks pandemik tidak terbatas pada Covid-19 dan sesudahnya. Apakah kita akan mengejar ruang hologram virtual (semacam penampakan kembali jasad tubuh untuk rekayasa pentas ruang panggung yang kasat mata secara *online*)

9 Sebuah interview di toko pusat elektronik Yogyakarta, 2019.



seperti banyak dicontohkan oleh kasus seniman pop berkulit hitam bernama Tupak Shakur di Amerika. Seniman ini sudah mati sebagai korban kekerasan, ruang keluarga diambil karena perbedaan ideologi politik rasial di Amerika, dan dari kasusnya kita bisa belajar bahwa reproduksi *image* bahkan digitalisasi tubuh dan suara tak mampu memanusiakan kedudukan warga kulit hitam dalam konteks politik Amerika dan Eropa sampai saat ini. Ketika dia sudah terhapus, terbunuh, meskipun karyanya masih bisa diperjualbelikan dengan penggantian melalui metode *virtual hologram*, konsep dasar tujuan terkait apa dan bagaimana seni Tupak Shakur dilahirkan tentu telah berubah. Contoh keras ini saya pakai untuk melihat sebuah imajinasi ke depan kesenian desa. Apakah kita mungkin lebih baik berjuang mendapatkan gelombang dalam siaran radio yang didedikasikan pada urusan-urusan pedesaan kita? Mendengarkan wayang yang mungkin dengan menitipkan pesan perihal urusan aliran air (*tilep*—dalam bahasa Jawa) yang mulai terhambat sampah karena perumahan berbagai kelas di wilayah Desa Ngoto Bantul berdampak pada kesuksesan Desa Semail dalam panen raya dan juga desa-desa tetangga di sebelahnya? Bukankah wacana seni yang merespons kondisi peringatan terhadap kedaruratan fungsi pertanian menjadi sangat penting. Sehingga penentuan prioritas kebijakan yang melahirkan kreativitas dalam kebudayaan dan kesenimanan warga menjadi penentu, bukan saja soal ekonomi melainkan juga bukankah berkaca pada negara industri telah menunjukkan bahwa virtual dan digitalisasi tidak menopang dasar daya hidup manusia. Dalam konteks ini, contoh kematian sang seniman besar tersebut bahkan seolah menyadarkan bahwa secara makna, seni virtual telah



gagal mengembalikan kematian itu sendiri pada semangat yang lain. Karena tidak ada lagi pesan perjuangan melainkan berpindah ke peran yang jauh berbeda.

Pertanyaan ini mungkin tidak bisa berlaku secara seragam, dalam memenuhi kebutuhan rasa kreativitas dari masyarakat desa, yang tentu tidak saja mengharuskan kita mengalokasikan kepentingan kemampuan-kemampuan berkesenian warga, tetapi juga memperhatikan keragaman tingkat kelas warga desa dalam hubungannya (misalnya kalau di Yogya) dengan keraton, atau dengan institusi dan lembaga tertentu, atau bahkan dalam konteks perorangan mempertimbangkan bagaimana warga mendudukan kesenian dalam keseharian sebagai cara untuk bisa keluar rumah dan beristirahat dari ruang domestik hubungan normatif kerumahtangaan. Semua beragam, termasuk bagaimana negara dan desa berkolaborasi dalam tatanan struktur yang tidak paternalistis dalam melihat, misalnya, peran ronda dalam penyebaran Covid-19 dan juga justru terkait bagaimana kita melihat sisi komunal keamanan desa tersebut bisa diolah untuk refleksi internal. Ruang-ruang pelestarian dan kreativitas inovasi seni sebagai dua kutub yang berkesinambungan inilah yang selayaknya diterjemahkan dalam keseharian. Kesenian yang mewartakan betapa misalnya kupu-kupu berwarna-warni tidak hanya menyehatkan secara jiwa-mata dengan keindahannya dan keasriannya yang mana anak-anak desa punya hak untuk memahami hal keindahan itu, tetapi juga secara lebih penting lagi bisa menjadi penanda ruang produksi pangan yang tengah berlangsung dan sebagai penanda ruang kesuburan lahan. Atau tarian jamur, permainan gobak sodor, latihan panahan



desa, juga cerita Dewi Padi, cublak suweng, atau “Kancil Nyolong Timun” semua merunut konteks alam lingkungan yang para orang tua adalah gurunya.

Hal ini menerobos konsep desa lebih dari hanya sebagai tontonan dalam ekologi turisme, atau menerobos konteks di-liyan-kan desa sebagai semata lumbung logistik pangan, tetapi sekaligus direndahkan. Desa bukan merupakan wilayah eksotis sebagai tontonan, tetapi ia adalah sumber peringatan kegagalan modernisasi yang ceroboh, desa juga bukan hanya soal logistik yang tersambung secara infrastruktur. Karena keterhubungannya dengan ketahanan pangan sebagai subsidi dasar kemanusiaan kita mendudukkan ke dalam strategi mikropolitik ekonomi budaya yang secara makro dalam konteks menjadi manusia yang sepenuhnya bisa berjalan. Jika tidak, maka kemodernan Covid-19 dengan segala bahasa asingnya akan menjadikan pola ketergantungan yang menjadi semacam perangkat dan tentu itu juga berlaku seperti wacana *new normal* yang salah diterjemahkan.

***Hermenuetik* Perlawanan (Tatanan Penanda Ruang Desa dan Makna)**

Di dalam sebuah tulisan yang diterbitkan oleh Palgrave-Macmillan (“Memimpikan Panggung”, 2012)¹⁰ diceritakan tentang kesenian desa dan awal pemahaman dalam mentransmisikan pertanian dan sosial politik agraria. Juga peringatan kita pada nilai sawah, tanah, dan tanaman dengan daya tahan hidup di

10 Larasati, Rachmi Diyah. “Desiring the Stage: The Interplay of Mobility and Resistance” on *Neoliberalism and Global Theatre*, Palgrave, 2012.



tengah pertaruhan politik negara yang me-ranah secara sosial ke tingkat perdesaan. Lebih lanjut dalam tulisan itu dibahas kehadiran kelompok perempuan yang sewaktu Orde Baru disebut PKK yang walaupun berbeda tetapi dalam konteks sekarang kita juga mengenalnya dalam kelompok Dasawisma. Rumah-rumah budaya banyak hadir dan menjadi dasar penopang regenerasi ilmu seni yang kadang tak membumi. Peringatan-peringatan hari besar kenegaraan, seperti perayaan kemerdekaan, banyak mengundang kesempatan untuk berkreasi dan bergotong royong serta mengundang partisipasi warga desa. Di rumah, lagu-lagu dan iringan, baik dengan macapat atau tembang, menyampaikan pesan kedekatan kita dengan apa yang disebut ekologi dan mitologi, seperti *padang bulan*, Dewi Padi, onde-onde, gorengan tahu, atau secara mitologi gending Candra Kirana, dan penanda-penanda praktik berkesenian dalam lingkaran pemaknaan pangan yang aman yang lekat dengan struktur tradisi rumah desa yang berpagar pengetahuan (tanaman-tanaman) dan sawah.

Sebuah gambaran desa yang semakin jarang terdengar dan hanyalah menjadi romantisisme eksotik semata keberadaannya karena proses perubahan topografi politik tanah dan juga ditambah tantangan menghadapi pandemik.

Ketika pandemik Covid-19 yang bersifat global, seperti saya paparkan di awal tulisan ini, peningkaran solidaritas sosial di tingkat desa mulai ditinjau kembali dan panggilan-panggilan berupaya solusi menjadi diwartakan dan dikerjakan bersama. Namun, pandemik sebagaimana kita ketahui sudah pernah hadir, muncul lagi dalam bentuk pemisahan ketubuhan, bahkan ingatan antara



yang terkucilkan, terkarantina, dan tersegregasinya identitas politik yang memisahkan siapa yang berada dalam ranah “sehat” sosial menggunakan takaran “normal” identitas. Karantina sosial ternyata sudah pernah dan terjadi di negeri ini, menggerus berbagai ilmu kebudayaan dan bagian-bagiannya yang utama. Sehingga kehidupan yang lekat dengan pangan terjauhkan. Pandemi Covid-19 yang karena identifikasinya global-universal dan dirasakan bersama, akan melahirkan pemahaman khusus respons solidaritas serta akan membangun kemungkinan ke depan yang lebih memanusiakan kehidupan desa dengan caranya yang merdeka.

Untuk itu, saya ingin menggunakan identifikasi penanda keruangan desa, seperti sumber pengetahuan alam, dan bukan keruangan yang hanya bersifat logistik pemasok pangan yang dijual di pasar tanpa penghargaan.

Tentu seperti karya-karya arsitektur Yoshi Krisnamurti yang membantu pemahaman kita dalam memvisualkan konsep arsip yang hidup dan arsip yang membangun kehidupan, seperti kekuatan daya pikiran kita untuk mandiri dan mengolah ilmu pertanian kita secara infrastruktur bukan berbahan besi, tetapi kemanusiaan¹¹.

Contoh tersebut di atas mendekolonisasi peminggiran desa dari dunia “modern” urban dan kota serta superstruktur negara dalam kebijakan yang sering paternalistis¹². Dari sejarah, kita mengingat sistematika penggolongan kemampuan desa menjadi standar peradaban seolah tak memungkinkan dan bahkan pernah dikambinghitamkan dalam masa Orba dengan kekuatan tani dan

11 Dalam pembicaraan formal diskusi kedesaan, Yogyakarta 2019.

12 Rachman, Peluso, Aff. 2008. “Claiming the Ground for Reform.” Pada *Journal Agrarian Change*.



sistematikanya. Secara epistemologi, contoh karya rupa berupa pagar bambu atau pagar buah mengaitkan taktik kreativitas dan juga fungsinya dengan sebuah pengingat *metafor* akan batasan ruang fisik misalnya, tetapi memberi ruang pikiran yang revolusioner kemanusiaan dan arsip hidup yang memiliki kekuatan resistan terhadap proyek “me-liyan-kan” desa.

Pertunjukan seni yang bisa dilakukan di halaman juga pekarangan, diupayakan mencitrakan daya tahan desa akan menjadi jawaban utama dengan dedikasi jelas untuk mendekonstruksi wacana modernitas. Maka berefleksi dengan sejarah ruang desa: ritual kesenian dan pemahaman kegagalan modernitas kota, justru mengantarkan kita kepada kedudukan desa sebagai metode ingatan. Arsip yang berjalan, pemikir mandiri, tidak bisa disepelekan.

Untuk mempertegas pemikiran ini, saya ingin memberi contoh beberapa kasus:

1. Geopolitik Kali Winongo dan penjagaan ruang kreasi

Sebagai peta kesejarahan pola tubuh dan ingatan resistansi warga dalam masa transisi pemerintahan Orde Baru telah menjadi arsip pemaksaan perubahan. Penindasan petani dan pergantian lahan yang meneruskan taktik kolonial dengan pabrik gulanya. Di tahun 1970 dan sebelumnya, Kota Bantul memiliki alur batas kali sebagai dasar pikir upaya kerja. Kali/sungai sebagai pusat air dan pertumbuhan imajinasi karya budaya memiliki demarkasi orientasi keterhubungan antardesa yang dalam hal ini mengaliri pola inovasi berkesenian dan keilmuan pangan. Munculnya Desa Manding sebagai sentra kulit dan Desa Kasongan sebagai sentra keramik menandai lekatnya karya alam



dengan topografi budaya desa. Bahkan secara tubuh, Kali Winongo juga menjembatani simbolik demarkasi keinginan rasa, posisi gender, dan negosiasi keperempuanan, misalnya.

Ada semacam rasionalitas meta ruang. Perubahan pendapatan perajin Manding banyak dinarasikan karena persaingan dengan teknik kulit perajin Asia Timur, tetapi narasi lokal merekam pemfitnahan identitas petani dan peternak yang merugikan kehidupan rakyat. Anehnya, pandemik Covid-19 mampu merombak karantina sosial, tetapi seyogyanya kesejarahan pandemik sebelumnya, juga bisa dipakai sebagai refleksi untuk tatanan ke depan.

2. Wacana sosial ritual desa yang sering diharamkan: penghilangan ajakan solidaritas

“Sebuah upacara khitanan dengan hiburan wayang dan tari-tarian telah berakhir, seorang bocah laki-laki terduduk di tengah arena dan pandangan kelelahan dari keramaian pesta yang baru saja berlalu. Namun, dengan penuh perhatian terhadap apa yang ada di luar pagar sekelompok pengemis berjejer menanti sisa-sisa makanan.” Narasi ruang ritual khitanan (sunatan) dan pertunjukan ini mengundang kita untuk menengok penanda keterbukaan warga terhadap kesenian dan upacara ketubuhan laki-laki. Narasi ingatan ini, mengundang saya untuk merujuk pada sebuah karya translasi dari karya pembuka Pramoedya Ananta Toer berjudul “Buronan”. Tulisan kedesaan ini mengajari kita tentang dasar filosofi perbedaan akses. Penggambaran rumah berpagar dan khitanan yang bisa dilihat oleh luaran, sebagai bagian dari politik agraria, membangun ajakan



imajinasi materialisme akan bagaimanakah bangunan-bangunan yang layak menyatu di desa itu. Berpagar besi? Bambu? Tanaman pangan? Juga mengayakan kita dengan pemikiran “asri” sebagai konsep filosofis manusia dan keindahannya.

3. Mendekonstruksi pandangan akan konsep liyan atau *wong sabrang* sebagai taktik

Pembangunan empati yang tidak mendorong kewajiban perbaikan dalam konteks relasi sosial tidaklah layak didengungkan. Saadiya Hartman¹³ seorang pemikir keadilan sosial dan *literature* tentang kelompok yang dipinggirkan (dalam konteks Amerika adalah warga ras kulit hitam) secara lebih lanjut berargumentasi perihal penolakan penarasian kembali bentuk kekerasan guna memutus mata rantai stigma sangatlah menjadi pilihannya. Diawali oleh contoh penarasian kekerasan yang dialami oleh para golongan kulit hitam yang tentu secara gampang dianggap menyedot perhatian terhadap kesejarahan diskriminasi masa perbudakan di negara tersebut, tetapi ternyata secara detail perhatian terhadap perbudakan tersebut, yakni dengan mengekspos kembali kekerasan yang dialami oleh tubuh-tubuh kulit hitam, justru meneruskan kembali penderitaan itu secara berlanjut layaknya memutar adegan dan kesengsaraan yang diulang kembali yang bisa melebihi jarak batas sejarah sekaligus membangun stigma yang permanen. Di sini kita menghubungkan bagaimana teori perbedaan terhubung dengan modernitas dalam kesadaran, tetapi masih berlandaskan pada pemahaman yang

13 Hartman, Saidiya V. 1997. Scene of Subjection. *Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth-Century America (Race and American Culture)*. Oxford UP.



me-liyan-kan, atau mendiskreditkan semua yang bukan di dalam kesamaan identitas dengan golongan dominan. Bahwa memikirkan perbedaan dilahirkan dari sebuah struktur dominasi yang ada dan muncul di sekitar kita.

Seperti apa yang juga disampaikan oleh Gloria Anzaldua bahwa dalam memahami perbedaan, tidak hanya soal bagaimana translasi lokasi identitas dan pemahamannya, seperti dia ada di sana sedang saya di sini, atau antara kita dan mereka—perbedaan desa dan kota, misalnya—melainkan juga termasuk semua hal yang bisa kita pahami secara inheren sebagai sebuah prediksi sosial tentang batas, perbatasan sebagai pemahaman kemanusiaan—seperti sebuah jembatan dan kaveling tingkat desa yang bisa bersifat diskriminatif, atau ruang privat kepercayaan keagamaan, artinya bagaimana agama dominan selalu merasa punya hak lebih untuk menilai yang tidak menjadi bagiannya.”¹⁴

4. Juga pandangan secara gender, dalam kedudukan bagaimana laki-laki, kebijakan, dan liyan di tingkat desa

Ahmad Tohari dalam novelnya “Penari” (*Ronggeng*), melihat kehidupan Srinthil dari sisi translasi dia dengan ketubuhan korban. Tohari memasuki dunia imaji kehidupan Srintil dan kisah cintanya dengan Rasus sang tentara sebagai bahasa maskulin penerimaan terhadap Rasus yang terikat negara. Patriarki nasionalisme ini menjembatani apa yang Gayatri Spivak sebut sebagai relasi etik dengan mengundang kita untuk melihat bagaimana perbedaan dijembatani oleh kekuatan *literature* (cara pikir) kelas yang lebih

14 Anzaldua, Gloria. 2012. *Borderland, La frontera: The New Mestiza*. Aunt Lote Books.



dominan (elite). Dalam konteks Spivak disebut *sub-altern* yang berupa translasi dan usaha mendudukan objek lain menjadi dekat dengan kita (*self*) dan juga bagaimana translasi daya pikiran untuk lebih diterima secara luas.¹⁵ Dalam dunia sastra misalnya, translasi tidak bisa dilakukan tanpa kelas elite terdidik dan juga bagaimana kelas elite terdidik tak akan bisa menjadi dominan tanpa bentuk kerja dari yang tak terdidik. Jadi keberadaan elite juga tergantung non-elite. Di sinilah politik perbedaan yang tetap melahirkan liyan dan berkorelasi secara epistemik dan sistematik.

Edward Said dalam buku monumentalnya *Orientalism*¹⁶ mengajak kita untuk memahami bagaimana tubuh-tubuh yang dicitrakan dari dunia Timur terkotakkan dalam kategori keterbelakangan sebuah modernitas. Misalnya gambar Aladin, sajadah terbang, atau lampu sulap yang muncul selalu dikaitkan dengan identitas Timur Tengah yang bersifat terbelakang dan pantas ditertawakan. Walaupun ini hanya berkuat dalam wacana seni populer dan kemudian berkembang menjadi penghubung ke wacana politik, juga secara berkelanjutan muncul dalam kebijakan politik internasional baru. Belajar dari hal ini, kita tidak berniat mendudukan desa dalam ketergantungannya secara rasa dan ketubuhan sebagai yang di-liyan-kan. Seperti kata “*wong ndeso*” seolah memproduksi superioritas kebijakan tata kota dalam memandang ketubuhan dan ruang hidup termasuk daya inteligensinya. Dan perdesaan sudah seharusnya lebih diarahkan menjadi sumber inspirasi tata asri dan tata pangan. Untuk itu, semangat regenerasi

15 Spivak, Gayatri. 2013. *An Aesthetic Education in the Era of Globalization*. Harvard University Press.

16 Said, Edward. 1979. *Orientalism*. Pantheon Book.



ilmu seni dan pendekatan alam menjadi *urgency*, tidak hanya ada pada daya tahan dalam tatanan baru ini, tetapi secara inheren pada usaha menolak demarkasi “ke-liyan-an” karena strategi penghapusan ruang produksi pangan pertanian yang ternyata merumahkan manusia dalam konteks kemanusiaannya, bahkan memberi ruang keberlangsungan dasar kehidupan dan berperan secara global.

Kita adalah desa dan tidak terbelakang. Kita, desa yang memproduksi pangan dan itu adalah pengetahuan. Karena desa bukanlah hantu dan *eksotika* modernitas.

Terima kasih.

Tulisan ini ditulis di atas tanah masyarakat adat Bdóte dan the Anishinaabeg (Ojibwe) yang telah dihilangkan dan berganti nama menjadi Minneapolis sebagai penanda *settler colonial* Amerika dalam konteks pemerintahan modern United States. Tulisan ini disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Desa 2020, pada seminar *webinar* ke-10, sesi “Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru”.

Tulisan ini memaparkan bagaimana menyiapkan ruang desa secara kolektif-budaya dalam konteks pandemik, artinya memahami pandemik dari sisi sejarah dan topografi alam di sekitar kita sebagai dasar perilaku dan mendudukkan lingkungan sekitar sebagai “rumah” yang melindungi. Juga landasan kesiapan respons desa secara kebijakan terhadap keindonesiaan yang merdeka dalam berpikir dan berkarya menuju tatanan yang baru (yaitu masa krisis dari pandemik Covid-19).



Profil Penulis

Rachmi Diyah Larasati. Tragedi 1965 merupakan salah satu catatan kelam bagi para penari di Indonesia. Jutaan orang menjadi korban, termasuk musisi, penari, dan seniman yang dianggap berideologi kiri. Buku karyanya terkait tragedi tersebut terbit 2013, berjudul *The Dance That Makes You Vanish*, menceritakan bagaimana penari perempuan “ditangani” oleh negara. Karena Diyah percaya bahwa seni dan tarian itu syarat makna, baik secara politik maupun sejarah negara.

Menurutnya, makna seni banyak didekonstruksi. Bentuk tarian penari dihilangkan, lalu diganti dengan tarian yang penuh keindahan, pesona, pendukung pariwisata, dan dijadikan bentuk perwakilan bangsa yang ideal bagi pasar global. “Ketika kita membicarakan nilai tradisi, tidak berarti hanya membicarakan yang indah-indah. Karena kita juga harus memanusiasi manusia yang mengalami kekerasan,” ungkapnya dalam wawancara video *Dance of the Missing Body*.

Rachmi Diyah Larasati merupakan profesor Teori Budaya dan Kesejarahan Tubuh Tari dalam Kajian Politik dan Gender di Department of Gender, Women, and Sexuality Studies, University of Minnesota, Amerika Serikat. Berbagai gagasannya terkait seni dan gender jamak terdengar di lingkup akademik maupun seni. Kini Diyah kembali ke Bantul, merintis rumah budaya yang mengajarkan tarian pada anak-anak.





Nusantara Mengajar

Iman Budhi Santosa

Makalah ini sengaja menggunakan judul “Nusantara Mengajar”, persis seperti buku yang saya tulis di tengah masa pandemi Covid-19. Sedangkan wujud dari ajaran yang dimaksud berupa peribahasa. Penentuan judul tadi diilhami oleh peribahasa Sikka, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbunyi: “*Diri nian tutur, depo tana doneng.*” Artinya ‘mendengar dunia berbicara, mengikuti tanah mengajar’. Sebuah ungkapan unik dan khas yang prinsipnya memberi nasihat agar bertingkah laku sesuai adat dan

norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti yang diwariskan oleh nenek moyang.

Di Indonesia, selain peribahasa dalam bahasa Indonesia, terdapat pula peribahasa yang menggunakan bahasa daerah (Nusantara) dengan muatan pesan beragam. Umumnya, muatan pesan dalam peribahasa tersebut memiliki kaitan dengan dunia filsafat, psikologi, antropologi, adat budaya, bahasa dan sastra, agama, sosiologi, biologi, edukasi, ekonomi, hukum, lingkungan hidup, serta dunia ilmu pengetahuan lainnya. Dengan demikian, ujaran dan ajaran dalam peribahasa bukan fenomena yang kedaluwarsa, bukan pula ketinggalan zaman.

Sejak berabad lalu sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masyarakat Nusantara di masing-masing wilayah sudah memiliki tatanan budaya berdasarkan nilai-nilai yang diciptakan sesuai dengan latar belakang lingkungan dan kepercayaan yang dianutnya. Dengan demikian, seluruh gerak dinamika kehidupannya telah diatur sedemikian rupa berlandaskan norma-norma adat yang menjadi kesepakatan di tingkat lokal. Norma-norma tersebut umumnya dikemas dalam bentuk peribahasa menggunakan bahasa daerah masing-masing yang memaparkan berbagai masalah hidup keseharian mereka.

Peribahasa, atau sering disebut aforisme, wujudnya adalah kelompok kata atau kalimat yang susunannya tetap untuk mengungkapkan pernyataan tertentu. Isinya adalah perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, aturan tingkah laku untuk individu maupun sosial, baik yang dipujikan atau dilarang dalam



adat tradisi setempat. Konstruksi kalimatnya pun dibuat singkat, padat, puitis, agar memiliki daya tarik sehingga mudah dihafal dan diingat oleh masyarakatnya. Dalam sejarahnya, peribahasa tersebut lahir dan digali dari simpul-simpul pandangan hidup yang bersumber pada agama, kepercayaan, mitos, religi, falsafah, serta ajaran para cerdik pandai/pujangga/wali/raja/datu/pendeta di masa lalu yang terbukti ampuh menjadi pedoman hidup mereka.

Di Indonesia terdapat tidak kurang dari 1.340 suku bangsa dan lebih dari 546 ragam bahasa daerah. Maka, bukan mustahil jika di sana tersimpan puluhan ribu peribahasa yang menjadi pedoman hidup masyarakat Nusantara di masa lalu. Dengan berpedoman pada nilai dan tata kehidupan seperti tercermin dalam peribahasa mereka, ditambah nilai-nilai baru yang menjadi acuan hidup dan kepercayaannya, ternyata suku-suku bangsa di Indonesia berhasil mendirikan NKRI, kemudian menjaga dan melestarikannya hingga kini.

Maka, sudah selayaknya manakala masing-masing suku bangsa mulai melakukan pengenalan dan pembelajaran terhadap peribahasa saudara sebangsa setanah air ini untuk makin merekatkan semangat *patembayatan* (kebersamaan) dalam menjaga keutuhan NKRI. Walaupun teks aslinya menggunakan bahasa daerah masing-masing, tetapi lewat terjemahannya dalam bahasa Indonesia dapat dipahami arti maknanya dengan jelas.

Setelah 75 tahun merdeka (1945-2020), harus diakui bahwa Indonesia telah mengalami berbagai macam kejadian serta perubahan,



baik yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Persis seperti disampaikan peribahasa Dayak Ngaju, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berbunyi: “***Genep danum bandalem, tiwing runtub.***” Artinya ‘setiap air banjir, tebing runtuh’. Maknanya, setiap kali berganti pimpinan, berganti pulalah peraturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh rakyat. Peribahasa lain dari Dayak Ngaju yang sama maknanya: “***Sinde danum bandalem, sinde pasir hubah.***” Artinya ‘sekali air dalam, sekali pasir berubah’.

Walaupun Indonesia telah mengalami banyak perubahan, tetapi relevansi peribahasa daerah Nusantara sebagai pedoman hidup bagi masyarakat modern masih diperlukan. Antara lain untuk menyadarkan adanya pluralisme tatanan hidup yang telah berurat-akar di Tanah Air kita. Seperti dipaparkan peribahasa Jawa: “***Desa mawa cara, negara mawa tata.***” Artinya ‘desa mempunyai adat sendiri, negara mempunyai hukum sendiri’. Peribahasa ini mengisyaratkan bahwa masing-masing daerah wajar jika mempunyai adat-kebiasaan yang berbeda-beda. Kaitannya dengan negara, desa (komunitas masyarakat tertentu) telah membentuk *angger-angger* (ketentuan adat) untuk lingkungan sendiri yang cenderung lebih lentur. Sedangkan negara memerlukan hukum (peraturan) yang lebih tegas, tetapi bersumber pada adat istiadat yang tumbuh berkembang di masyarakat.

Melalui peribahasa itu pula generasi muda masa kini dapat merunut kembali sejarah akar budaya kampung halaman masing-masing. Seperti dituturkan peribahasa Lampung: “***Lebu dalih kalama dang lupa mak ti sepok, ulun tuba jak ipa kuk asalni***”



mak ngedok.” Artinya ‘asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan, dari mana asal kita jika tak punya orang tua’. Nasihat bagi kaum muda agar jangan gampang melupakan leluhur yang melahirkan dan membesarkan kita. Sebab, hanya dari merekalah kita dapat mengetahui dan mempelajari nilai-nilai masa lalu untuk bekal menempuh kehidupan kelak kemudian hari.

Lewat peribahasa yang memuat kearifan lokal Nusantara itu kita juga dapat membayangkan tingkat kebudayaan bangsa ini, seperti ditegaskan peribahasa Madura: “*Basa gambhâranna budbi.*” Artinya ‘bahasa menggambarkan buii’. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari cara berbicara (tutur katanya). Di sini termasuk bagaimana penggunaan bahasanya, tata krama, dan lain-lain. Maksudnya, karena bahasa merupakan produk budaya suatu bangsa, maka lewat bahasa (termasuk peribahasanya) akan tampak sifat serta nilai pandangan hidup mereka yang sesungguhnya.

Contoh-contoh peribahasa di atas agaknya dapat dijadikan “umpan” sekaligus pengantar untuk mendedah nilai-nilai yang melandasi kebudayaan Nusantara. Karena pada setiap peribahasa nyata-nyata mengejawantahkan keunikan yang khas mengenai: 1) permasalahan yang diungkapkan; 2) teknik dan konstruksi pemaparan; 3) *metafor*/simbol/padanan yang digunakan; 4) muatan pesan yang ingin disampaikan.

Berdasarkan data-data peribahasa Nusantara yang sempat dikumpulkan dari berbagai literatur dan dibukukan dalam: *Mutiara Kearifan Nusantara* (2007), *Dunia Batin Orang Jawa* (2007), *Budi Pekerti Bangsa* (2008), *Kumpulan Peribahasa Indonesia* (2009),



Nguri-uri Paribasan Jawi (2010), *Nasihat Hidup Orang Jawa* (2010), *Petuah-Petuah Bijak Leluhur Nusantara Seputar Perkawinan* (2011), *Peribahasa Nusantara, Mata Air Kearifan Bangsa* (2016), *Mutu Manikam, Pendidikan Karakter* (2017), terdapat sejumlah fenomena yang cukup menarik. Ternyata di antara peribahasa-peribahasa Nusantara tadi banyak yang mengalami kesepadanan, kemiripan, kesinambungan makna pesan, juga perbedaan pemaknaan yang mencolok, serta keistimewaan ungkapan dan makna yang khas. Misalnya yang berkaitan dengan relasi sosial kemanusiaan, relasi sosial ekonomi, dan relasi sosial politik.

Beberapa contoh peribahasa Nusantara yang berhubungan dengan ketiga relasi itu, antara lain:

Relasi Sosial Kemanusiaan

1. Kerja Sama dalam Masyarakat

- ***Kalo samo tinggi kayau di rimbo mano pulo tanpaik angin lalau*** (Melayu Kerinci, Provinsi Jambi). Artinya ‘kalau sama tinggi kayu di rimba (hutan) mana pula tempat angin lalu’. Maknanya, posisi tinggi rendah dalam kehidupan bukannya saling mempersulit, melainkan justru mendatangkan manfaat kepada banyak orang. Kaya miskin, besar kecil, laki perempuan, pemimpin maupun rakyat, pembeli atau pedagang, semua terkait satu sama lain dan akan membentuk struktur kehidupan yang saling menguntungkan.
- ***Amun kayu sama kagantung intu himba, intu kueh riwut akan mahalau*** (Dayak Ngaju, Provinsi Kalimantan Tengah).



Artinya ‘kalau kayu sama tingginya di hutan, di mana angin akan lewat’. Maknanya, kalau semua manusia mempunyai pangkat yang sama pasti tak ada pekerjaan yang selesai. Kesadaran bahwa dalam setiap kegiatan memerlukan kerja sama, ada pemimpin dan yang dipimpin, ada yang mengatur ada yang melaksanakan.

2. Semangat Kebersamaan

- ***Bejalan di belakang tak menumit, di muo tak menyepak*** (Riau, Provinsi Riau). Artinya ‘berjalan di belakang tak *menumit*, di muka tak menyepak’. Nasihat agar siapa pun mau dan mampu menempatkan diri dengan baik, entah ketika di belakang (sebagai rakyat) atau ketika di depan (sebagai pemimpin).
- ***Bejalan dulu jangan ninggel, bejalan dudi jangan numet*** (Provinsi Bangka Belitung). Artinya ‘berjalan *dulu* jangan meninggalkan, berjalan di belakang jangan menginjak tumit’. Pepatah ini menggambarkan bahwa anggota dalam suatu kelompok (masyarakat/keluarga) harus selalu bersama-sama dan tidak boleh saling merugikan atau saling mengabaikan satu sama lain.
- ***Yan bebaris maraq dowong (lomaq) yan bebanjar maraq pare/pade*** (Sasak, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Artinya ‘berbaris bagaikan bibit yang ditanam, berbaris bagaikan susunan padi yang telah terikat’. Jika setiap orang dalam masyarakat lingkungannya mau memenuhi norma-norma adat



serta aturan yang disepakati maka kehidupan akan menjadi harmonis.

- ***Eda seranganga caé clocoban: benangang*** (Bali, Provinsi Bali). Artinya ‘jangan membuat alur yang serong, turutlah arah yang tepat’. Nasihat agar siapa pun tak membiasakan berbuat salah atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, dalam bertindak sebaiknya menggunakan pedoman yang benar dan mapan, baik menurut nilai-nilai agama maupun norma-norma sosial yang berlaku dalam lingkungannya.

3. Pergaulan

- ***Ite mananuru kura mamorino ite mamari, kura malalaire eka palalari, kura maa’ minuwe eka minu, itula mansyiya elmu eka elmu*** (Seram Barat, Provinsi Maluku). Artinya ‘kita bergaul dengan *suwanggi* (setan) kita menjadi *suwanggi*, dengan pencuri jadi pencuri, dengan peminum jadi peminum, bersama manusia yang mempunyai ilmu jadi berilmu’. Sering dijadikan nasihat kepada orang muda agar hati-hati dalam memilih teman bergaul.
- ***Manatol du matapia alim dad alim manatol du matapia binaka dan binaka*** (Sanana, Provinsi Maluku). Artinya ‘Berkawan dengan orang alim menjadi alim, dengan pencuri menjadi pencuri’. Nasihat agar berhati-hati dalam memilih kawan. Sebab, jika kita berteman dengan orang baik bisa ketularan baik, berteman dengan penjahat mungkin juga ketularan sifat jahatnya.



4. Rasa Kemanusiaan

- ***Si tou timou tumou tou*** (Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara). Artinya ‘seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain’. Peranan seseorang (*tou*) ialah “menjadi manusia”, serta mempunyai potensi untuk berkembang (*timou*), tetapi ia bertanggung jawab juga untuk menghidupkan (*tumou*) orang lain. Jelasnya, manusia harus mengembangkan potensi dan kualitasnya untuk dapat mempunyai arti atau peranan dalam masyarakat.
- ***Timaqne iye jari anak jadah, laguq kanak ini ndeq araq salaq*** (Sasak, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Artinya ‘walaupun ia menjadi anak yang tidak jelas ayah atau ibunya, tetapi ia tak ada salahnya’. Meskipun seorang bayi lahir dari hubungan yang tidak sah (dibenarkan agama), tetapi kehadirannya sama dengan bayi-bayi lain hasil dari hubungan suami istri yang sah. Yang berdosa adalah kedua orang tuanya karena telah melanggar hukum agama yang dianut, sedangkan si bayi tidak.
- ***Eda duleg teken lacur*** (Bali, Provinsi Bali). Artinya ‘jangan benci dengan orang miskin’. Nasihat bahwa membenci orang miskin merupakan tindak perbuatan sangat buruk dan tercela. Orang miskin bukannya harus dibenci, disalahkan, tetapi harus ditolong (dikasihani). Sebab, hidup di dunia memang harus tolong-menolong, saling membantu kesulitan orang lain, bukan saling membenci.



5. Membunuh Orang

- ***Ditumpes sacindhile abang*** (Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY). Artinya ‘dibunuh (dimusnahkan) sampai anak cucunya’. Ungkapan yang menggambarkan dendam kesumat yang kelewat-lewat kepada seseorang. Di mana yang bersangkutan sudah dianggap bukan manusia, melainkan disamakan dengan tikus. Maka, agar tidak merajalela dan mengganggu lagi, sebaiknya dibunuh (dimusnahkan) saja hingga keturunannya, walaupun anak-cucu tersebut tidak berdosa dan sama sekali tidak mengetahui duduk permasalahannya.
- ***Munaub uba munaub direi*** (Melayu Kerinci, Provinsi Jambi). Artinya ‘membunuh orang (berarti) membunuh diri sendiri’. Dalam pandangan adat Melayu Kerinci, membunuh orang termasuk kejahatan besar yang sangat tercela, dibenci, dan tidak dapat diampuni. Mereka juga menilai membunuh orang sama halnya dengan membunuh diri sendiri dan si pembunuh tersebut akan selalu dihantui oleh perbuatannya tersebut sepanjang hidupnya.

6. Nilai-Nilai Adat

- ***Diri nian tutur, depo tana doneng*** (Sikka, Provinsi Maluku). Artinya ‘mendengar dunia berbicara mengikuti tanah mengajar’. Ungkapan ini memberi nasihat agar bertingkah laku sesuai adat dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti yang diwariskan nenek-moyang.



- ***Enane taram agan iwiatongengee, Em arap nap atendak, mesim arap nap atendak, o arap nap atendak, ib arap nan atendak. Kela arap nap atendak iatong beno! Inak juo onen diamo!*** (Amungme, Provinsi Papua). Artinya ‘anak-anak, mengapa berbuat demikian, padahal kamu tahu bahwa pohon itu adalah diriku, anjing itu adalah aku, air itu juga diriku, tanah pun aku, dan batu itu pun diriku. Berbuatlah semaumu, aku akan mengawasimu’. Ungkapan yang menggambarkan tingginya semangat menghargai alam lingkungan. Misalnya, merusak alam lingkungan dianggap menyakiti diri manusia sendiri.

7. Adat Budaya

- ***Matee aneuk na jeurat, matee adat pat tamita*** (Provinsi Aceh Darussalam) Artinya ‘mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya’. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan (pembasmian) terhadap adat istiadat yang berlaku. Seandainya itu terjadi, bagaimanakah mengembalikan adat istiadat tersebut pada tempatnya semula?
- ***Iyya nanigesara’ ada’ ‘biyasana buttaya tammattikamo balloka, tanaikatongannamo jukuka, annyalatongi aséya*** (Bugis, Provinsi Sulawesi Selatan). Artinya ‘jika dirusak adat kebiasaan negeri maka tuak berhenti menitik, ikan menghilang pula, dan padi pun tidak menjadi’. Jika adat dilanggar berarti melanggar kehidupan manusia dan akibatnya bukan dirasakan



oleh yang bersangkutan saja, melainkan juga oleh segenap anggota masyarakat, binatang, tumbuhan, dan alam semesta.

8. Hubungan Baik Sesama

- *Maan matulengka moka uleluwekan taan maleo-leosan* (Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara). Artinya ‘walau tengkurap sudah lesung padi (tak terpakai lagi) tapi berbaik-baiklah’. Dalam keadaan apa pun, manusia harus saling memelihara hubungan baik antarsesama. Meskipun senang atau susah, hubungan tersebut harus tetap dipelihara.
- *Kotek akenen gola, kemetan talin akenen geto* (Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Artinya ‘(semoga) kepala tidak terpisah dari badan (dan) tali kemetan (jangan sampai) putus’. Menggambarkan persatuan yang kokoh di mana salah satu unsurnya tidak boleh hilang karena jika demikian akan menghancurkan persatuan tersebut. Persatuan di sini diibaratkan rantai, di mana salah satu mata rantai tersebut hilang (rusak) maka rantai itu tidak berfungsi lagi.

9. Menghormati Agama dan Kepercayaan

- *Hau fo matai, maro-marfo maku-ise* (Ternate, Provinsi Maluku Utara). Artinya ‘waktu memancing kita berpisah, waktu bernyanyi kita berkumpul’. Ungkapan yang menganjurkan supaya orang saling menghargai dan hormat-menghormati terhadap agama dan kepercayaan masing-masing.



- ***Kusu ma-bunga yo-sai fo marasai, kano-kano ma duko mai fo manggungano*** (Ternate, Provinsi Maluku Utara). Artinya ‘alang-alang bunganya melayang kita rasakan, rumput tebu satu pucuk kita harapkan’. Imbauan agar orang saling menghormati agama dan kepercayaan masing-masing. Meskipun beda jalan, toh akhirat di akhirat nanti akan bertemu (bersama kembali).

Relasi Sosial Ekonomi

1. Tolong-menolong

- ***Tani sama ndi lembu neo sama ndi tewe*** (Mbojo, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Artinya ‘berat sama dipikul ringan sama dijinjing’. Maknanya adalah seia sekata, senasib sepenanggungan. Merupakan etos (semangat) kebersamaan masyarakat adat di Indonesia dalam menjalani kehidupannya yang dimanifestasikan menjadi gotong royong.
- ***Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang*** (Minangkabau, Provinsi Sumatra Barat). Artinya ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’. Sebagai bagian dari masyarakat maka seharusnya tiap-tiap individu memiliki semangat untuk bekerja sama dan bertanggungjawabkan secara bersama-sama segala kepentingan bersama.
- ***Paesan rorak, porak, tio-tionan ung kanaramen*** (Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara). Artinya ‘pekerjaan berat bila dikerjakan bersama-sama akan ringan, dan lakukanlah sebagaimana mestinya’. Ungkapan ini mengandung nasihat, jangan meremehkan orang lain (mau menang sendiri), jangan



segan-segan membantu sesama atau tak mau bekerja-sama dengan siapa pun, dan jangan suka melanggar ketentuan yang berlaku dalam masyarakat.

- ***Rio-rio fo maku rio kaso mai i-dadi ka-abe*** (Ternate, Provinsi Maluku Utara). Artinya ‘kita saling menolong dan berat pun menjadi ringan’. Nasihat atau anjuran agar suka memberi pertolongan kepada orang lain karena sifat seperti itu sangat terpuji dan dianjurkan oleh semua agama.
- ***Tangi di siluluton, bege di siriaon*** (Batak, Provinsi Sumatera Utara). Artinya ‘seseorang harus tajam pendengaran terhadap berita duka dan langsung bertindak, sedangkan mengenai berita suka orang boleh saja bersantai-santai’. Dalam pandangan bermasyarakat, duka dianggap sebagai beban, sehingga orang lain perlu ikut serta meringankannya. Sebagaimana konsep *berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*.
- ***Boolo sebatang idak nembolke raket*** (Palembang, Provinsi Sumatera Selatan). Artinya ‘bambu sebatang tidak menimbulkan rakit’. Rencana maupun pekerjaan besar sulit berhasil jika hanya dilakukan seorang diri. Untuk itu sangat diperlukan kegotongroyongan dengan banyak orang.

2. Menerima Tamu

- ***Kepe milan nan go kai wayak nara, nara lewo pulo doan tana lema*** (Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Artinya ‘biar tempat sirih pinang kotor, tetapi kami pergi untuk menyuguhkan kepada tamu’. Gambaran dari penghormatan,



penghargaan, dan rasa senang dalam menyambut tamu. Apa pun yang dimiliki, meskipun kesannya kurang pantas, tetap disuguhkan sebagai bukti keterbukaan dalam menerima kedatangan mereka. Selain itu, ada peribahasa lain: *lango rae lango kopi gula take*. Artinya ‘rumah itu tak perlu didatangi, rumah yang tak menyuguhkan kopi atau teh’. Dalam ungkapan ini, rumah yang tak punya kopi atau teh dan gula melambangkan keluarga yang kikir (pelit) terhadap sesama.

- *Oli mengarak mendah simah nidonyo ngejatkan dai, masiah kilah senyum tao* (Serawai, Provinsi Bengkulu). Artinya ‘walaupun melayani tamu dari jauh atau dekat, tidak pernah menampakkan muka masam, dan tetap tertawa riang’. Tamu dalam adat Serawai harus dihormati, sesuai falsafah mereka *kebaikan lebih mulia dari harta*.

3. Gotong Royong

- *Rukun agawe santosa, crab agawe bubrah* (Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY). Artinya ‘rukun damai membuat sentosa (kokoh kuat), bertengkar membuat rusak (kehancuran)’. Peribahasa ini merupakan salah satu sikap hidup orang Jawa yang mendambakan kerukunan dan kedamaian di masyarakatnya.
- *Esa ate u mawangun banua* (Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara). Artinya ‘satu hati memperindah desa/kampung’. Ungkapan untuk mengajak bersatu bila menghadapi pekerjaan besar yang berhubungan dengan keperluan masyarakat. Di samping itu juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang



bersifat tolong-menolong antarkeluarga, tetangga sekampung, yang dilandasi semangat gotong royong.

4. Semangat Berbagi

- ***Alai cedde'e risesena engkai mappedeceng, sampeanngi maegae risesena engkai maega makkasolang*** (Bugis, Provinsi Sulawesi Selatan). Artinya 'ambil yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan dan tolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan'. Mengambil sesuatu dari tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk perbuatan *mappasitinaja* (keputusan). Kewajiban yang dibaktikan memperoleh hak yang sepadan pula, yaitu perlakuan yang patut. Banyak atau sedikit tidak dipersoalkan oleh keputusan, kepantasan, dan kelayakan yang lazim di Sulawesi Selatan.
- ***Bagian ke awak, tebanyak ke uang*** (Riau, Provinsi Riau). Artinya 'bagian ke diri sendiri, berlebih ke orang'. Bagian untuk diri sendiri cukuplah sekadarnya saja dan lebih-lebihkanlah untuk kepentingan umum. Serangkum pesan mengenai pentingnya peduli kepada sesama. Kepentingan umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Begitulah norma hidup di masyarakat adat Riau.

5. Kerukunan

- ***Ada kutang apang ada duduk, ada pejang apang ada jemak*** (Bali, Provinsi Bali). Artinya 'ada dibuang supaya ada dipungut,



ada ditaruh supaya ada diambil'. Maknanya, apabila kita senang menolong orang, pasti akan ada orang lain pula yang menolong jika kita mengalami kesulitan. Peribahasa ini merupakan nasihat agar dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bersama sebaiknya mengutamakan kegotongroyongan (kerukunan) dan tolong-menolong antarteman, tetangga, maupun sanak saudara.

- ***Kilau langgei panyair, kalok awi oloh tau ingambuah, kalok kabuat dia tau ingambuah*** (Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah). Artinya 'seperti pisau peraut, bengkok oleh orang dapat diluruskan, bengkok sendiri tak dapat dibetulkan'. Maknanya, kesusahan orang dapat diselesaikan, tetapi kesusahan sendiri sering membutuhkan pertolongan untuk mengatasi. Misalnya, dalam mengurus kematian, senantiasa diperlukan bantuan atau uluran tangan orang lain karena tidak dapat dikerjakan sendiri.
- ***Barato awe nga tebing, unak ngga barut*** (Serawai, Provinsi Bengkulu). Artinya 'seperti bambu (akar bambu) dengan tebing, ujung rotan dengan kain'. Menggambarkan kuatnya kesatuan dalam ikatan gotong royong untuk saling menunjang antarsesama guna mewujudkan cita-cita bersama. Ibaratnya, terjadinya ikatan akar bambu dengan tebing membuat tebing menjadi kuat dan tidak mudah longsor.
- ***Api 'ata 'ola hege, wair 'ata 'ola neni*** (Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Artinya 'api orang biasa mengambil, air orang biasa meminta'. Maknanya, mereka selalu saling memberi api dan air karena pada dasarnya manusia harus hidup bersama



dan selalu diharapkan saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya.

6. Menghargai Orang Cacat

- ***Uang lumpou penunggu jomou-an, uang bisu penjago ladang*** (Riau, Provinsi Riau). Artinya ‘orang lumpuh penunggu jemuran, orang bisu penjaga ladang’. Kesadaran menghargai orang cacat. Mereka jangan diejek karena meskipun cacat masih ada gunanya (masih dapat bekerja).
- ***Nan buto pahambuih lasuang, nan pakak palapeh badia*** (Minang, Provinsi Sumatra Barat). Artinya ‘yang buta pengembus lesung, yang tuli pelepas bedil’. Ungkapan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak turut memberikan andil dalam kehidupan bersama sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pesannya adalah janganlah kita merendahkan satu sama lain karena kekurangan yang dimiliki. Setiap orang pasti punya kekurangan, tetapi juga pasti punya kelebihan.
- ***Nan lumpuab pauni rumah, nan patab pangajuik ayam*** (Minang, Provinsi Sumatra Barat). Artinya ‘lumpuh penunggu rumah, yang patab penghalau ayam’. Hormatilah orang lain. Hargailah kelebihanannya. Maklumilah kekurangannya. Berbagilah tugas dengan adil sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- ***Je dia tau mananjung manunggu huma*** (Dayak Ngaju, Provinsi Kalimantan Tengah). Artinya ‘yang tidak dapat berjalan menunggu rumah’. Maknanya, setiap orang pasti ada



gunanya. Atau, setiap orang senantiasa memiliki kemampuan mengerjakan sesuatu. Contohnya, orang lumpuh. Meskipun tak dapat berjalan, dia masih dapat bekerja (dipekerjakan), misalnya sebagai penunggu rumah.

7. Hemat

- *Nyalutu panjawatn sinsat panamuan* (Dayak Kendayan, Provinsi Kalimantan Barat). Artinya ‘cermat melakukan perbuatan dan berhematlah atas penghasilan yang didapat’. Nasihat agar dalam melakukan pekerjaan dikerjakan secermat mungkin dan menggunakan penghasilannya juga demikian (tidak boros).
- *Tabimat yek mantong na, beuteugoh that yoh gob cilaka* (Provinsi Aceh Darussalam). Artinya ‘hemat semasa masih ada, hati-hati sebelum celaka’. Berhematlah semasa dalam keadaan senang (berada), berhati-hatilah pula sebelum terjerumus (kena). Di daerah Gayo (Aceh Tengah) terdapat pula pepatah yang arti maknanya sama dengan ungkapan di atas, yaitu *inget-inget sebelum kona, hemat jimet tengah ara*. Artinya ‘ingat sebelum kena, hemat selama masih ada’.
- *Atutui wattu diangna, ingarangngi diwoeqna* (Mandar, Provinsi Sulawesi Barat). Artinya ‘pelihara sewaktu masih ada, ingat akan di belakangnya atau ketika sudah habis’. Sebuah nasihat agar jangan bertindak boros.

Relasi Sosial Politik



1. Perubahan Sosial Politik

- ***Tebing runtuh tepian beranjak, tanjung putus teluk beralih*** (Melayu Jambi, Provinsi Jambi). Artinya ‘tebing runtuh tepian berpindah, tanjung putus teluk beralih’. Mengingatkan pada semua orang bahwa setiap kejadian selalu membawa (mengakibatkan) perubahan. Entah kecil entah besar, entah menyakitkan entah membahagiakan, dan orang harus siap menerima sebagaimana adanya.
- ***Genep danum handalem, tiwing runtuh*** (Dayak Ngaju, Provinsi Kalimantan Tengah). Artinya ‘setiap air banjir, tebing runtuh’. Maknanya, setiap kali berganti pimpinan, berganti pulalah peraturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh rakyat. Peribahasa lain yang sama maknanya: ***sinde danum handalem, sinde pasir hubah***. Artinya ‘sekali air dalam, sekali pasir berubah’.

2. Permufakatan

- ***Bulat aei kono pembulou, bulat kato kono mupakat*** (Riau, Provinsi Riau). Artinya ‘bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat’. Kias bahwa air menemukan bentuknya karena pembuluh (tempatny), sedang kata menemukan bentuknya karena mufakat (kesamaan pendapat).
- ***Mabolat ai’ ka’dalam solekng, mabolat kata dalam bapakat*** (Dayak Kendayan, Provinsi Kalimantan Barat). Artinya ‘membulatkan air ke dalam bambu, membulatkan kata dalam



mufakat'. Dalam menyelesaikan permasalahan umum (sosial) perlu menyatukan pendapat melalui musyawarah mufakat.

- ***Bulek aia ka pambuluh, bulek kato jo mufakat, tuah sapakat, cilakonya dek basilang*** (Minangkabau, Provinsi Sumatra Barat). Artinya 'bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat, tuah hasil sepakat, celaka karena ngotot bersilang pendapat'. Pepatah yang menggambarkan adanya nilai kedaulatan rakyat serta adat. Bahwa suara (sikap) rakyat melalui musyawarah mufakat merupakan keputusan tertinggi dalam masyarakat dan berbahaya apabila dalam bermufakat tersebut tidak menghasilkan keputusan secara bulat. Karena bisa mengakibatkan terjadinya silang pendapat yang memicu kekisruhan dalam masyarakat.

3. Ketidakadilan

- ***Buka nyebit tinge ngamis kacerikan*** (Bali, Provinsi Bali). Artinya 'seperti membelah bambu mengecil sebelah'. Gambaran dari tindakan yang dilakukan dengan tidak adil sehingga merugikan pihak-pihak yang lemah atau masyarakat kecil. Oleh karena itu, sikap perbuatan tersebut sangat dibenci orang.
- ***Bak membolah botung, sebolah diinjak sebolah gi diangkat tinggi-tinggi*** (Melayu Jambi, Provinsi Jambi). Artinya 'bagaikan membelah bambu betung, sebelah diinjak sebelah lagi diangkat tinggi-tinggi'. Sering digunakan sebagai padanan terhadap ketidakadilan yang diperbuat oleh penguasa atau pemimpin.



Terbukti, ada pihak yang sengaja ditekan (dikalahkan), ada pihak yang sengaja diuntungkan (dimenangkan).

4. Syarat Pemimpin

- ***Aju maluruemi riala parewa bola*** (Bugis, Provinsi Sulawesi Selatan). Artinya ‘hanyalah kayu yang lurus dijadikan ramuan rumah’. Di sini rumah sebagai perlambang dari pemimpin yang melindungi rakyat. Hanya orang yang memiliki sifat lurus (jujur) yang layak dijadikan pemimpin, agar yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi perannya dengan baik.
- ***Dedende puuno, susu mumono*** (Provinsi Sulawesi Tenggara). Artinya ‘tidak goyah pohonnya, berayun pucuknya’. Ungkapan ini mempunyai makna bahwa seorang pemimpin harus tangguh, sekalipun masyarakat yang dipimpin goyah, tetap mengajarkan keteguhan hati kepada mereka dalam menghadapi segala cobaan hidup.
- ***Kayu tinggai dimpeh angan nyan*** (Melayu Kerinci, Provinsi Jambi). Artinya ‘kayu tinggi dihempas angin nian’. Seorang pemimpin atau penguasa memang tak pernah sepi dari kritikan orang banyak. Namun, jika dia benar-benar jujur dan bertindak sesuai norma (hukum) yang berlaku tak perlu gelisah dan takut. Setiap pemimpin harus memiliki sifat tabah, kuat menerima kritik. Ibarat pohon hutan yang tinggi besar, tahan terhadap hempasan badai.
- ***Lo iya lo ta uwa, ta uwa loloiya, bo’odila polusia hilawo*** (Gorontalo, Provinsi Gorontalo). Artinya ‘pemimpin itu penuh



dengan kewibawaan, maka dirinya tidak boleh sewenang-wenang'. Peringatan bagi setiap pemimpin (penguasa) karena memiliki kewibawaan dalam mengatur masyarakat maka potensi kepemimpinan yang dimiliki jangan digunakan berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

5. Pemimpin yang Buruk

- ***Da mupajari maraqdia tau messipaq paniki*** (Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan). Artinya 'jangan jadikan raja orang yang bersifat kalong (kelelawar)'. Nasihat agar menghindari pemimpin yang tidak mempunyai pendirian kokoh karena pemimpin demikian akan membuat rakyat kehilangan arah (pedoman) dalam mencapai kemakmuran.
- ***Burung kecil ciling mato, burung gedang dua suaro; titian galing dalam negeri, pagar nan rapat makan tanaman*** (Melayu Jambi, Provinsi Jambi). Artinya 'burung kecil juling mata, burung besar dua suara; titian goyang dalam negeri, pagar rapat makan tanaman'. Gambaran atau padanan terhadap pemimpin yang tidak dapat dipercaya. Ketika seorang pemimpin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan mereka yang dipimpin maka ia akan menemukan banyak kesukaran untuk bergerak di tengah orang-orang yang dipimpinnya.
- ***Raje adil raje disembah, raje lalim raje disanggah*** (Provinsi Aceh Darussalam). Artinya 'raja adil akan disembah, raja zalim akan disanggah (ditendang)'. Setiap raja yang memerintah



dengan adil, bijak, dan jujur perlu disembah atau diikuti. Namun, kalau zalim dan bertindak sewenang-wenang perlu disanggah atau ditentang (dilawan).

6. Kedudukan

- *Ail naf nub rau, ne isir babo mur* (Kei, Provinsi Maluku). Artinya ‘pancing tinggal di perahu semang dan juran, tali jangkar perahu kalulis belakang’. Terjemahan bebasnya, tali kail tinggal di perahu semang dan tali jangkar tinggal di belakang perahu kalulis. Maksudnya, kedudukan seseorang sebaiknya disesuaikan dengan bakat dan keahliannya. Sebab, setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda.
- *Pontudangi tudammu, puonroi onromu* (Bugis, Provinsi Sulawesi Selatan). Artinya ‘duduki kedudukanmu, tempati tempatmu’. Orang harus tahu dan mau berada pada posisi yang telah menjadi haknya. Semacam nasihat agar setiap orang jangan suka merebut kedudukan dan tempat orang lain yang bukan haknya.

7. Orang Pintar dan Bangsawan

- *Kusuik nan kamanyalasaikan, karuah nan akan mampajaniab* (Minang, Provinsi Sumatra Barat). Artinya ‘kusut yang akan menyelesaikan, keruh yang akan menjernihkan’. Peran orang pandai, intelektual, atau pemimpin yang dibesarkan oleh komunitasnya. Posisinya ibarat *didahulukan setapak, ditinggikan*



seranting, agar dapat menyelesaikan dengan baik permasalahan yang timbul.

- ***Inde baranaq siulang, sendana sikandeq; manarang umpiak bannang, umpaq tallu baluak*** (Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan). Artinya ‘hubungan dari orang pintar dan bangsawan dapat menyelesaikan dan membuat hal yang sulit’. Kepandaian dan kekuasaan apabila bersatu dengan baik akan membuat masyarakat tenteram karena berbagai permasalahan mudah diatasi, tetapi kalau para cerdik pandai dan penguasa (pemimpin) beda pendapat (berseteru) akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat.

8. Rembug Bersama

- ***Baampar bide batukutn karadatn*** (Dayak Kendayan, Provinsi Kalimantan Barat). Artinya ‘membuka bide menghidupkan pelita’. Bide adalah sejenis tikar yang nilai dan harganya sangat tinggi. Maknanya, persoalan atau permasalahan yang dihadapi harus diselesaikan secara musyawarah (duduk bersama di atas bide) guna mencapai kata mufakat.
- ***Ana rembug dirembug, ana prakara ditata*** (Provinsi Jawa Tengah, DIY). Artinya ‘ada masalah yang perlu dibicarakan, harus dibicarakan; ada masalah yang dihadapi sebaiknya ditata (ditangani) bersama’. Gambaran mengenai adanya semangat mengadakan musyawarah mufakat dalam masyarakat Jawa.
- ***Ino fo makati nyinga doka gosora se bualawa*** (Ternate, Provinsi Maluku Utara). Artinya ‘mari bersatu seperti pala dan



cengkeh'. Pala dan cengkeh merupakan lambang kemakmuran dan persatuan di Maluku Utara karena kedua tanaman itu tumbuh subur di sana. Makna peribahasa ini adalah ajakan menggalang musyawarah mufakat dengan dilandasi semangat kebersamaan.

9. Putusan Hukum

Kula wiit ganu wulang dua deri lepo kara wiit ganu lero moang gera woga (Sikka, Provinsi Maluku). Artinya 'menimbang bagaikan terangnya bulan, memutuskan bagaikan panasnya matahari'. Ungkapan ini berisikan gambaran bagaimana mengadili dan memutuskan perkara seadil-adilnya tanpa memihak kepada mereka yang bertikai.

Beuget ade peutimang hukom (Provinsi Aceh Darussalam). Artinya 'harus adil menimbang hukum'. Pada saat memutuskan suatu hukum dalam satu perselisihan, sebelum mengambil kesimpulan untuk penetapan hukum itu, hakim yang mengadili kasus tersebut harus menimbanginya dengan adil, jujur, dan baik agar tidak terjadi kekeliruan.

10. Pluralisme

- ***Nagari bapaga undang, kampung bapaga buek*** (Minang, Provinsi Sumatra Barat). Artinya 'negeri berpagar undang-undang, kampung berpagar perjanjian'. Setiap negeri dan kampung mempunyai undang-undang dan peraturan sendiri yang tidak sama antara negeri atau kampung satu dengan yang



lain. Maka, kewajiban setiap orang adalah menghormati dan mematuhi peraturan yang berlaku di mana ia tinggal.

- ***Desa mawa cara, negara mawa tata*** (Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY). Artinya ‘desa mempunyai adat sendiri, negara mempunyai hukum sendiri’. Pandangan tradisional di Jawa yang menghargai adanya pluralitas. Di mana masing-masing lingkungan wajar jika mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda. Kaitannya dengan negara, desa (lingkungan masyarakat) telah membentuk kebiasaan (*angger-angger*) untuk lingkungan sendiri yang cenderung lebih lentur. Sedangkan negara memerlukan hukum (peraturan) yang lebih tegas, tetapi bersumber pada adat istiadat yang tumbuh berkembang di masyarakat.
- ***Muba dolok, muba dubutna, muba buta, muba ubuma*** (Batak, Provinsi Sumatra Utara). Artinya ‘lain gunung lain rumputnya, lain kampung lain hukumnya’. Peribahasa ini menggambarkan kesadaran masyarakat tradisional di Batak mengenai pluralisme. Setiap masyarakat memiliki adat istiadat yang berbeda di masing-masing tempat dan tak bisa diseragamkan.

11. Persatuan dan Kesatuan

- ***Rubu-rubu rame-rame, doka saya rako moi*** (Ternate, Provinsi Maluku). Artinya ‘rimbun-rimbun ramai-ramai, seperti kembang satu ikatan’. Perumpamaan ini memuat petuah agar semua orang menghindari sikap perbuatan dan



ucapan yang berpotensi memecah belah sehingga menimbulkan pertengkaran atau perselisihan. Inti pesannya, eratkan saja tali persatuan dan kesatuan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga kehidupan menjadi indah seperti seikat bunga.

- ***Opu-pain epun-boit ne lika akenen betu keluba akene bela*** (Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Artinya ‘saudara-saudara marilah bersama berhimpun dan bergotong royong agar periuk dan tungku tidak terbelah dan hancur’. Seruan kepada pihak-pihak yang sedang bertengkar (berselisih) agar segera menyelesaikan beda pendapat dan konflik fisik tersebut dengan baik agar persatuan dan kesatuan tidak hancur.

Manakala dicermati, masing-masing peribahasa dalam tema yang sama sering mengindikasikan adanya sudut pandang berbeda. Namun, perbedaan tersebut bukannya menstimulasi paradoks, melainkan justru akan menambah pemahaman kita mengenai dimensi-dimensi yang tersembunyi dalam fenomena tadi. Walaupun demikian, ada juga peribahasa dalam tema tertentu yang pesan muatannya sangat mirip dan nyaris sepadan satu sama lain.

Demikianlah, dengan mempelajari peribahasa Nusantara, sama halnya telah menghayati dan berusaha menemukan pati sari *kebhinekaan* dan keunggulan budaya bangsa ini sehingga nantinya benar-benar dapat diwujudkan (diterapkan) dalam hidup dan perilaku keseharian kita ke depannya.

Yogyakarta, 6 Juli 2020.



Profil Penulis

Iman Budhi Santosa. “Ketika orang ingin menulis sastra, jangan karena ingin dipanggil sastrawan. Namun, menulislah dengan hati.” Itulah lontaran menarik Iman Budhi Santosa saat orasi budaya pada acara Sastra Musim Pancaroba, 2015 lalu. Kejelian dan kecintaannya pada budaya menjadi ciri khas karyanya. Selalu mengandung nilai Jawa dan Nusantara.

Ia menjadi rujukan generasi muda pecinta sastra. Berbagai buku puisi, novel, cerpen, artikel, maupun makalah menjadi saksi kehidupannya di dunia sastra. Bahkan di kalangan muda, ia disapa Romo, sebagai penghormatan atas kesetiaannya pada budaya. Salah satu karyanya adalah *Profesi Wong Cilik: Spiritualisme Pekerja Tradisional di Jawa*, terbitan 1999.

Buku tersebut mengungkap tentang dunia batin di balik pekerjaan dukun bayi, penjual jamu gendong, jagal sapi, dan lainnya, untuk memaknai hidup, pekerjaan, serta rezeki. Kejelian yang unik karena Romo Iman justru mengamati profesi yang saat ini sudah jarang ditemui. Selain berkarya, ia juga mendirikan Persada Studi Klub (PSK). Komunitas sastra yang didirikan tahun 1968 untuk menghidupkan kembali sastra kebudayaan. t





Wabah Berkembang Jadi Guru: Catatan Seorang Relawan Literasi

Nirwan Ahmad Arsuka

Di bangku sekolah dulu, kita diajar banyak peribahasa. Salah satunya adalah *alam berkembang jadi guru*. Peribahasa ini, yang menggarisbawahi pentingnya observasi dan empirisme, biasanya diajarkan bareng dengan peribahasa lain yang dihadirkan dalam bentuk pantun, *berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki; berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi*.

Amukan pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini memang tak boleh diterima hanya sebagai wabah yang menelan banyak korban jiwa dan kerugian materiel. Pandemi global yang tak punya rasa hormat pada kedaulatan negara ini harus juga diterima sebagai momen sekali seabad untuk belajar, untuk merenungkan berbagai hal penting dan merumuskan ulang langkah-langkah dalam kehidupan kita.

Pelajaran pertama yang langsung bisa dipetik adalah desa ternyata bisa kembali menjadi kekuatan sejarah. Di masa silam Nusantara, desa-desa memang pernah menjadi kekuatan sejarah, tetapi posisi itu hilang akibat berkembangnya kota-kota besar yang menyedot kekuatan dari desa-desa sekitarnya. Penyedotan kekuatan desa itu agaknya sudah terjadi pada era pembentukan kerajaan-kerajaan besar, tetapi tampak nyata pada pembentukan metropolitan yang tumbuh bersama datangnya gelombang modernisasi. Urbanisasi yang selalu membawa *brain drain* dari desa ke kota itu makin menggerus kekuatan desa-desa. Namun, pandemi global Covid-19 ini telah menghantam kota-kota besar dan melumpuhkan kegiatan ekonomi dan sosial. Desa-desalah yang menyelamatkan kehidupan kota-kota itu dengan menampung limpahan penduduk dari kota dan menyediakan bahan pangan untuk warga kota yang bertahan. Desa-desa juga menjadi faktor penting penyelamat kehidupan ekonomi nasional karena terus bergeraknya kegiatan ekonomi di tengah amukan wabah.

Pelajaran kedua adalah pentingnya literasi dalam berbagai hal. Desa-desa yang kegiatan literasinya cukup bagus adalah desa yang mampu bergerak mandiri memutus rantai penularan wabah dan



sanggup mengoordinasikan tanggapan yang efektif jika ada warganya yang tertular virus. Desa-desanya seperti ini tak mudah termakan oleh berita bohong dan tak lengkap, semburan hoaks, dan aneka teori konspirasi yang mengaburkan pemahaman atas pandemi yang sedang mengamuk. Mereka jadi pelopor dalam gerakan warga melawan wabah yang menularkan semangat perlawanan ke desa-desa tetangganya atau desa-desa lain di pulau lain yang bisa dijangkau lewat jaringan internet. Yang pasti, desa-desa yang memiliki kegiatan literasi yang kuat adalah desa yang sanggup menuliskan sejarahnya sendiri. Desa yang punya sejarah tertulis adalah desa yang punya peta ruang dan waktu yang bagus, mereka tahu masa silam mereka dan paham posisi mereka di masa sekarang. Pemahaman akan masa silam dan masa sekarang memudahkan mereka untuk menyusun rencana masa depan.

Pelajaran ketiga adalah mendesaknya penguasaan sains dan teknologi, khususnya yang menjawab kebutuhan desa dan menopang keunikannya. Pelajaran ketiga ini berkait erat dengan pelajaran kedua, yakni kekuatan literasi, dan menjadi prasyarat untuk membuat desa-desa kembali menjadi kekuatan sejarah. Pemilihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi itu jelas membutuhkan tingkat literasi yang memadai. Desa-desa yang mengenal masa silamnya dan memahami keunikannya, akan sangat terbantu untuk mengembangkan kekuatannya dengan dukungan teknologi yang tepat. Kombinasi antara penguasaan khazanah tradisi dan sejarah masa silam dengan penguasaan teknologi yang terus dikembangkan, akan mempermudah desa mengubah diri menjadi metropolitan kecil



yang tetap terkait rapat dengan lingkungan alam, tetapi aktif terlibat dalam konsumsi, produksi, dan distribusi informasi yang subur.

Jalan bagi desa-desa Indonesia untuk menjadi metropolitan kecil telah diperkuat dan diperlebar lewat program nasional pembangunan infrastruktur dan pembagian Dana Desa yang berjumlah cukup besar. Infrastruktur yang merata dan memadai memang belum sepenuhnya tercapai, tetapi jalan untuk transformasi desa sudah terbuka secara bertahap. Upaya pemerintah ini, dengan berbagai kekurangan yang masih bisa diperbaiki, itu jelas perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Tanggapan itulah yang menentukan tingkat kemampuan desa-desa untuk menjadi kekuatan sejarah yang mampu ambil bagian membentuk masa depan bersama republik. Wabah Covid-19 telah mempertegas kemampuan desa untuk menopang dan memecahkan masalah kota. Desa-desa yang berubah menjadi metropolitan kecil, di mana manusia hidup dengan akar sejarah dan kultural yang jelas, serta dengan kompetisi yang lebih sportif dan bermartabat, juga dapat menjadi suka peradaban modern tempat modernitas menyembuhkan dan meremajakan diri. Desa-desa modern itu dapat menjadi penyelamat buat orang-orang yang merasa tertinggal dan terhempas oleh persaingan sengit dan ketakberakaran (*rootlessness*) yang makin merajalela bagai pandemi di tengah globalisasi yang belum memenuhi semua janjinya. Ringkasnya, desa-desa masa depan kita bukan saja bisa bereksperimen membangun kefasihan baru untuk mengeja ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A. Desa-desa tersebut, sampai tingkat tertentu, bisa ikut menyelamatkan impian besar modernitas dari apa yang oleh Pankaj Mishra disebut sebagai “Zaman yang Marah” (*Age*



of Anger). Ringkasnya, desa-desa yang merawat khazanah dan percaya diri menghadapi dunia, yang sanggup mengolah kreativitas dan menyuburkan solidaritas, dapat ambil peran dalam berbagai wujud untuk ikut membentuk realitas zaman baru dan mendorong peradaban memasuki tataran yang lebih baik.

Desa, Metropolitan Kecil, dan Kekuatan Kebudayaan

Saya sejak pertama kali dikabari untuk berpartisipasi dalam acara Kongres Kebudayaan Desa 2020 ini, benar-benar gembira dan menyambut dengan senang hati. Oleh karenanya, besarnya rasa terima kasih, saya ucapkan kepada kawan-kawan panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa ini. Setahu saya ini merupakan Kongres Kebudayaan Desa pertama di Indonesia. Jika itu benar maka Kongres Kebudayaan Desa ini bisa dianggap sebagai cahaya di tengah kesuraman pandemi Covid-19 ini. Ketika wabah ini meruntuhkan rasa percaya diri banyak orang dan membuat mereka seperti kehilangan kepercayaan pada pihak-pihak lain, justru kawan-kawan penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa ini tampaknya menghimpun rasa percaya dirinya dan dengan bagus melaksanakan sebuah kongres.

Saya kira nanti Kongres Kebudayaan Desa ini akan bisa kita tarik sebagai bagian penting dari kebudayaan kita. Kongres kebudayaan adalah mainan orang kota, mainan para cendekiawan atau yang orang-orang terhormat yang ada di istana. Namun, Kongres Kebudayaan Desa ini membangun satu ruang sendiri di mana orang-orang desa itu bisa berkumpul dan membicarakan



masalahnya. Walau kalau kita lihat sedikit lebih jauh, Kongres Kebudayaan Desa ditopang para intelektual di Jogja, kawan-kawan seperti Bung Lukman Solihin (Kemendikbud), dan juga ada satu orang yang lagi saya baca karyanya, yang menulis “Psikologi Raos, Sainifikasi Kawruh Jiwa Ki Ageng Suryomentaram”, Bung Ryan Sugiarto (Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020). Menyemangati kawan-kawan seperti ini, orang-orang yang memilih untuk bertahan di desa—itu yang juga menjadi program kami di Pustaka Bergerak, sebuah gerakan penyadaran literasi yang sedang kami kerjakan.

Ada kesejajaran memang antara apa yang dibangun oleh Pustaka Bergerak dengan apa yang diupayakan oleh kawan-kawan di Kongres Kebudayaan Desa ini. Yakni, mencoba mewujudkan dan memperkuat apa yang bisa kita sebut sebagai—meminjam frase dari Pramodya Ananta Toer—” arus balik”. Sebelumnya, saat wabah Covid-19 meledak jadi petaka global, Arundhati Roy juga pernah menulis dengan cukup bagus tentang pandemi ini dan dia menyatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah sebuah portal dari masa silam menuju masa depan. Kita memang bisa melihat pandemi ini sebagai sebuah momentum yang membalik arus, arus di mana yang sebelumnya bergerak ke kota-kota, sekarang berbalik ke desa-desa.

Cukup lama memang kota-kota itu menjadi kekuatan sejarah. Namun, kota-kota kita termasuk Jakarta, pernah dilabeli sebagai kampung besar, sebagai *big village*, sebagai desa besar. Wilayahnya mungkin besar, tetapi perilaku orang-orangnya dicemooh sebagai perilaku orang-orang kampung, yang kampungan. Cemoohan itu bertahan sampai cukup lama dan masuk ke kesadaran publik kita.



Seingat saya, Usmar Ismail membuat sebuah film tentang kehidupan orang Jakarta yang diberi judul *Big Village!*. Kata *kampung besar* ini kemudian meluas dan juga dipakai sekaligus menginspirasi Ali Sadikin membuat Program Perbaikan Kampung yang terkenal itu. Namun, intinya adalah bahwa kota-kota tumbuh, termasuk ibu kota kita Jakarta, tetapi ada sejumlah hal yang dibawa oleh penduduknya dari desa itu yang menjadi problem di kota-kota besar tersebut.

Dengan datangnya pandemi ini, dengan munculnya wabah Corona ini, kota-kota metropolitan yang selama ini dianggap sebagai pusat kekuatan historis, semua mengalami guncangan. Kita lihat bahwa keguncangan menghantam kota-kota besar ini, bukan hanya Jakarta, melainkan juga Surabaya, Makassar, dan banyak kota-kota yang sekarang disebut sebagai zona merah itu. Kota-kota itu ternyata mengharapkan sangat banyak bantuan dari desa-desa sekitarnya. Desa-desa di sekitar kota besar inilah yang kemudian ikut mengurangi, ikut menampung problem-problem yang datang dari kota-kota tersebut. Desa-desa ternyata memang punya kekuatan yang tak dapat lagi diremehkan. Ini yang saya katakan terjadi semacam arus balik yang mencuatkan peran dan rasa percaya diri desa, yang dipercepat oleh amukan pandemi.

Pandemi ini memang bisa dilihat sebagai wabah, tetapi juga bisa dilihat sebagai momentum. Yang saya maksud sebagai momentum adalah kesempatan untuk belajar atau untuk mempercepat agenda-agenda yang sudah lama dipikirkan orang tentang bagaimana mengembalikan desa sebagai kekuatan sejarah dan kebudayaan. Pramoedya jelas membayangkan desa sebagai kekuatan kebudayaan. Ketika dia menulis di bagian awal novel besarnya itu, dia menceritakan



perubahan Desa Sumberaja, desa yang dulu jadi sumber datangnya penguasa-penguasa, yang kemudian merosot menjadi Desa Awis Krambil, desa yang bahkan kelapanya pun sudah semakin meranggas dan tak dapat menopang kehidupan warganya sendiri.

Upaya untuk membalik arus itu sebenarnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah kita dan kawan-kawan di Kementerian Desa itu dengan menyediakan Dana Desa. Seiring dengan itu, pemerintah membangun infrastruktur yang besar-besaran ke seluruh penjuru Tanah Air. Kurang lebih semua ini bisa ditangkap sebagai upaya untuk membalik arus sejarah dan kebudayaan. Kehadiran pandemi ini dapat mendorong arus itu menjadi lebih cepat, bertahan lama, dan berdampak luas.

Kawan-kawan di Jogja kelihatannya relatif lebih siap untuk menyambut arus balik ini, bahkan kemudian ikut mendorong arus ini bisa dibuktikan dengan munculnya Kongres Kebudayaan Desa ini. Walaupun, dugaan saya, Kongres Kebudayaan Desa ini juga sudah direncanakan sebelum adanya ledakan pandemi, tetapi Kongres Kebudayaan Desa ini satu langkah awal untuk memperkokoh, untuk membangun rasa percaya diri orang-orang desa, bahwa mereka sesungguhnya bisa juga untuk merebut kembali kekuatan yang pernah mereka miliki. Desa-desa bisa kembali jadi kekuatan sejarah yang ikut membentuk perubahan.

Akan tetapi, untuk menjadikan desa-desa kembali sebagai sebuah kekuatan sejarah, sebagai “Sumber Raja”—kalau kita pinjam Pramoedya Ananta Toer—rupanya memang tidak cukup dengan hanya melulu mengandalkan khazanah yang diwarisi dari para



leluhur desa. Desa hanya bisa menjadi kekuatan sejarah jika desa juga menjadi metropolitan kecil, yakni sebuah tempat yang tetap mempertahankan kedekatannya kepada lingkungan alam, tetapi juga mampu membangun kegiatan di mana produksi pengetahuan dan informasi menjadi sama aktifnya dengan tempat-tempat lain. Mungkin saja tingkat produksi pengetahuan dan informasi desa itu tidak seaktif kota-kota besar, tetapi produksi informasi di desa-desa ini jelas harus lebih besar, lebih dinamis, dari apa yang sudah terjadi sekarang ini.

Pustaka Bergerak punya usulan program literasi desa dan ini didukung cukup bagus oleh Bito Wikantosa dan sejumlah orang di Kementerian Desa. Inti program itu adalah membangun perpustakaan-perpustakaan desa, menghidupkan kegiatan-kegiatan literasi di desa-desa. Karena hanya dengan perpustakaan yang baik, dengan kegiatan literasi yang dinamis, maka pengetahuan di desa tumbuh dengan bagus dan desa bisa ikut di dalam proses pembentukan kekuatan sejarah ini. Desa juga bisa menghasilkan informasi-informasi yang penting bukan hanya untuk desa itu sendiri, melainkan juga tempat-tepat lainnya.

Apa yang dilakukan Hairus Salim juga sudah kami coba kerjakan bersama kawan-kawan relawan yang bergerak dengan simpul-simpul yang jumlahnya sekarang hampir 3000 dan tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu program Pustaka Bergerak itu adalah mendorong penulisan sejarah desa. Tidak mudah memang melaksanakan program ini, perlu orang luar. Perlu relawan atau orang seperti Hairus Salim untuk merintis dan mendampinginya. Namun, desa-desa yang punya sejarah, desa yang bisa menceritakan sejarahnya



ke kaum mudanya, adalah desa yang gampang membangun rasa percaya dirinya dan membanggakan identitasnya. Desa seperti ini bisa mengorientasikan dirinya dalam arus perubahan. Mereka tahu asal-usulnya dan tahu ke mana mereka bergerak. Sejarah desa adalah salah satu sumber yang luar biasa penting bagi perkembangan desa, selain SDM dan SDA berupa tanah-tanah desa itu. Kalau sejarah ini bisa dihimpun dengan baik, kalau seluruh desa di Indonesia ini bisa mengumpulkan dan menuliskan sejarah-sejarahnya, itu akan luar biasa besar pengaruhnya.

Selain menggali dan menuliskan sejarah desa, kerja yang tak kalah penting adalah bagaimana menggunakan modernitas dan produknya untuk mengolah lahan dan berbagai sumber daya alam yang luar biasa itu. Kalau desa-desa di Indonesia ini bisa mengambil dan mengolah separuh saja teknologi orang-orang Belanda, negeri kecil yang memenuhi separuh kebutuhan buah dan sayur dunia itu, Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya pengaruh desa-desa di Indonesia ini. Desa-desa di Indonesia bukan saja akan mampu menghidupi sebuah republik, desa-desa itu bahkan mungkin mampu memberi makan sebuah planet.

Itu sekelumit sumbang gagasan saya dalam diskusi ini. Bagi saya, Kongres Kebudayaan Desa hanya akan berhasil jika bisa membuat desa-desa di berbagai tempat menjadi metropolitan kecil yang kreatif.



Profil Penulis

Nirwan Ahmad Arsuka. Ia dikenal sebagai budayawan yang sangat peduli pada kesadaran literasi. Alumni Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada ini mendirikan Pustaka Bergerak untuk mengubah mitos minat baca masyarakat Indonesia rendah. Sebuah jaringan literasi yang berdarma keluar-masuk kampung, lereng gunung, dan antarpulau untuk menjawab kebutuhan literasi bagi anak-anak. Pada tahun 2017, Pustaka Bergerak sudah memiliki 300 simpul relawan.

Sebagai budayawan, ia rajin menuliskan pemikirannya tentang fenomena kebudayaan di *Harian Kompas* dan *Jurnal Cipta*. Bahkan ia juga sempat menjadi kurator di Bentara Budaya milik Kompas selama lima tahun, 2001-2006. Sedang gagasannya yang lebih terstruktur secara akademik bisa disimak di *International Journal of Asian Studies* dan *Inter-Asia Cultural Studies Journal*.





Desa: Problem Pengetahuan dan Kebudayaan

Irfan Afifi

Tulisan ini akan saya mulai dengan menyorongkan dilema. Sesaat setelah menerima undangan panitia untuk menjadi salah satu narasumber dalam rangkaian acara Kongres Kebudayaan Desa 2020 ini, muncul sebuah kelebat pikiran yang menghinggapinya saya dalam bentuk dilema atau mungkin malah semacam paradoks. Dilema tersebut jika dalam bentuk pertanyaan, kurang lebih saya bahasakan seperti ini: “Bagaimana kita membincangkan dan

mempercakapkan kebudayaan yang kita tahu di era ini pengertian atasnya telah menyusut menjadi semata sebagai kesenian, tradisi, dan pengetahuan tradisional semata—tentu saja terkait relasinya dengan pandemi Covid-19 ini—di mana pada saat yang bersamaan seluruh kebijakan struktural-*programatis* penanganan pandemi Corona ini didasarkan pada temuan sains atau nalar modern—yang oleh manusia hari ini sering ditempatkan, didirikan, dan dihadapkan *vis a vis* dengan pengertian kebudayaan yang telah disusutkan tadi, yang justifikasinya didakwa berada di seberang yang ilmiah tersebut? Atau pada titik mana, tepatnya, tulisan saya ini bisa masuk akal didiskusikan dalam bangun carut-marut diskursus yang menyertai munculnya virus yang melanda dan sedang menghantui jagat manusia hari ini? Atau dari jurusan lain, bagaimana saya mempercakapkan sudut pandang kebudayaan yang sejak bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya, nalar kebudayaan dalam pengertian mendasarnya sebagai sistem makna dan pengetahuan telah berpisah secara diametral dengan nalar pandangan dunia keilmuan sains yang diajarkan di sekolah dan universitas?” Dari jawaban atas pertanyaan ini, sedikitnya, semoga kita bisa menjernihkan duduk perkara kebudayaan dalam konteks kebijakan, entah itu terkait pandemi yang melanda kita, maupun agenda keseluruhan dalam level penilikan ulang “wilayah” kebudayaan yang hingga hari ini merupakan ranah pinggiran telantar dalam jejaring tata-sosial, ekonomi-politik kita, yang ternyata terus saja secara sembunyi maupun terang-terangan kita rindukan.

Jika kita meyakini, sebagaimana Daoes Joesoef, salah satu mantan Menteri Pendidikan kita, bahwa kebudayaan seturut dengan



aspek maknanya sebagai *sistem ide* dan *nilai* dan *pengetahuan* yang dikandungnya adalah merupakan inang dari sistem pengetahuan dan keilmuan (sistem pendidikan), atau dalam rumusan lain ia, kebudayaan, merupakan faktor *konstitutif* sistem pendidikan dan sistem pengetahuan, kenapa hari ini dua hal ini di mana sistem pengetahuan modern (sains) yang mewujud dalam bangun-tubuh sekolah dan universitas kita, sungguh sedang berdiri berhadapan dengan kebudayaan yang telah menyempit menjadi sistem perilaku dan nilai yang ada di sebarang justifikasi ilmiah? Ada apa ini? Ada problem mendasar apa yang menghinggapi bangsa ini?

Kita mafhum gerak dan munculnya sistem pendidikan di negeri kita yang merdeka ini, jika kita mau berlapang dada, muncul dan hadir pertama-tama dari gerak eksogen dibanding desakan gerakan endogen. Ia sistem pendidikan modern ini adalah sesuatu yang didesakkan dari luar oleh kolonialisme di masa Politik Etis yang dicangkokkan penjajah bersama seluruh perangkat sistem pengetahuan (juga pada akhirnya perilaku dan nilai) yang baru yang memang berseberangan dengan pandangan dunia masyarakatnya. Meski pada awalnya, Belanda sebenarnya telah berusaha mengenali dan menyurvei sistem pendidikan asli pribumi untuk dijadikan dasar yang melambari bangun sistem pendidikan baru, tetapi pilihan akhir penjajah adalah *mengintrodusir* sistem pengetahuan dan ilmu yang mencerabutkan akar pengetahuan lama. Ia hadir dari sesuatu yang sama sekali asing (dan kemudian dicangkokkan) dari inang kebudayaan lain, yang sayangnya hingga hari ini menyebabkan fase transisi tanpa ujung (belum/tidak berhasil) kita selesaikan sebagai bangsa. Atau mungkin benar apa yang dikatakan Umar Khayam,



kita ini masih terus dalam keadaan *rasa terbelah dan gamang* dalam menyambut kebudayaan modern, tanpa/belum mau/belum berhasil menyelesaikan transisi ini.

Akibatnya, sayup-sayup kebudayaan dalam pengertian khususnya sebagai sistem pengetahuan tradisional (atau kebudayaan dalam pengertian tradisionalnya) yang memandu perilaku keseharian yang memberi makna bagi hidup, masih menghidupi dan menapasi kita (alias dalam derajat tertentu belum tergantikan, terutama di desa) di satu sisi, tetapi (berkebalikan dengan itu) di sisi lain seluruh perangkat, gaya, pranata, dan institusi ekonomi, politik, dan kemasyarakatan secara lahir tampil dalam wujud kulit dan baju modernitas tergelar dalam tampilan luarnya dan telah menjadi imperatif norma yang terus-menerus menginterupsi pandangan pengetahuan tradisional tersebut. Maka tak aneh, jika bangsa ini telah berhasil menyorongkan neologisme (istilah baru) bernama *budayawan* yang tak punya padanan katanya pada level pranata keilmuan dan kebudayaan pada negara-negara yang telah memeluk sistem keilmuan modern (sains) secara utuh. Istilah ini seolah menyodorkan bahwa terdapat nalar berbeda (bisa jadi berkait dengan nalar lama/atau bahkan berkait dengan tradisi yang masih hidup di pinggir modernitas) yang berada di luar demarkasi rasionalitas modern sains yang memandu sekolah dan universitas maupun kebijakan publik yang tunduk pada norma sains itu, yang ingin terus menyuarakan kebenarannya, dan sekaligus menjadi interupsi atas klaim nalar sains yang mengatur secara menyeluruh pranata sosial modern, mulai dari pranata sosial pemerintahan, bank, organisasi



sosial, dan lain-lain, yang senyatanya sudah, minimal secara lahir, menjadi entitas faktual dan kehidupan sehari-hari masyarakat ini.

Mungkin juga keberadaan pranata seperti kebudayaan dan kesenian tradisional yang sayup-sayup masih berusaha setengah mati dipertahankan, atau keberadaan sistem pendidikan tradisional bernama *pondok* atau *pesantren*—ya, sistem yang oleh Ki Hajar Dewantara dipandang sebagai sistem pendidikan *asli* pribumi itu—sebagai lokus pengetahuan *lain* di luar sains yang hingga hari ini masih terus mencoba bertahan di pinggiran demarkasi rasionalitas keilmuan dan sistem pendidikan modern (sains), atau banyaknya praktik maupun pengetahuan tradisi yang terus saja berdenyut, meski sayup-sayup, menyuarakan kearifan-kearifan yang banyak berseberangan dengan atau minimal berjalan terpisah di luar nalar modern, atau juga masih terdapatnya arus sistem ekonomi tradisional—sebagaimana dikatakan H. Boeke—yang tak segera terintegrasi atau berjalan sendiri/terpisah dari ekonomi modern yang mendasarkan capaian akumulasi kapital dalam mantra ekonomi kapitalisme modern. Atau juga munculnya pranata-pranata atau wadah-wadah pengajian atau ruang-ruang berskala masif pengajian kultural yang terus-menerus subur menjamur yang melabrak jam-positivisme waktu kerja produktif sebagaimana digariskan oleh waktu masyarakat industrial?

Apa yang sebenarnya tengah berlangsung pada masyarakat ini? Apakah sebenarnya ia *gamang* atau *enggan* menggabungkan diri dengan gerak laju modernitas secara penuh? Apakah memang sebagai bangsa kita belum berhasil, untuk tak mengatakannya gagal, mereintegrasi pada level kebudayaan dalam pengertian mendasarnya,



dalam bangun keilmuan dan kebudayaan modern secara utuh. Mungkin “*keterbelahan*” ini juga yang menyebabkan kita masih terus menyusu pada induk inang kebudayaan lain yang menjadikan kita masih terus-menerus jadi konsumen kebudayaan, yang oleh karenanya membuat kita tak begitu berdaulat dan mandiri secara kebudayaan, politik, maupun ekonomi, alih-alih membicarakan kepribadian bangsa. Kegagalan ini menyebabkan *perumitan* ke level dalam dinamika kebudayaan itu sendiri (dalam hal struktur kebudayaan dan pandangan lama, yang lambat-lambat masih berdetak), atau dalam bahasa lain *involusi*, yakni telah berpisahya dengan dinamika gerak perubahan yang terus berlangsung di luar kendali dirinya, yang alih-alih kita diharapkan menjadi “*actor* kebudayaan” yang berdaulat, tegak, dan mandiri dalam konteks individu, masyarakat, maupun bangsa dalam deru silang-kebudayaan arus teknologi-informasi mendunia yang meruah ke sejujur bumi, yang dengan sendirinya diikuti oleh suatu proses yang sering disebut sebagai *cultural impasse* (kebuntuan budaya).

Debat maupun polemik riuh terkait arah kebudayaan dari sejak Polemik Kebudayaan Sutan Takdir Alisyahbana di tahun 1930-an, Surat Kepercayaan Gelanggang, hingga Manifesto Kebudayaan, belum mengakhiri maupun menyelesaikan “*keterbelahan*” kebudayaan ini. Dan bahkan dalam derajat tertentu, meski keseluruhan manifestasi pranata sosial kita telah berubah menjadi institusi modern dan sebagian besar wajah-tampilan, gaya hidup, perangkat teknologi, perilaku konsumsi dan politik kita, sepenuhnya telah dipandang modern dalam bentuknya, tetapi sistem pengetahuan dan sistem nilai kita secara halus masih ditaburi dengan



tebaran struktur kearifan-religius dan tradisi yang masih bertebaran di ruang hidup kultural kita. Lalu, jika pada kenyataannya kearifan tradisi, dan nalar pengetahuan secara sembunyi, masih hidup dalam ruang kultural kita, akankah kita mampu merekonstruksi kearifan kebudayaan sesuai tantangan kekinian, tanpa terjebak pada *perumitan* kebudayaan ke dalam (baca: involusi), yang jangan-jangan usaha *pengatasan* atas masalah “*keterbelahan*” kultural kita ini sebenarnya merupakan solusi bagi upaya mengintegrasikan bangun identitas kultural bangsa ini yang akan menopangnya menuju kedaulatan dan kemandirian bangsa?

Saya jauh-jauh hari, merasa tak terlalu punya pretensi awal untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Namun begitu, permasalahan yang saya *sodorkan* bisa menjadi undangan bagi siapa pun untuk mengenali duduk perkara, minimal berkait relasi kebudayaan dan pengetahuan. Karena bagaimanapun, sistem pendidikan yang tercerabut dari akar sistem pandangan dunia dan kebudayaan masyarakatnya tidak akan memperkokoh kedirian dan kemandirian sebagai bangsa, dampak lanjutannya akan melanggengkan kegamangan dan “*keterbelahan*” kultural sebagaimana saya sedikit diskusikan di paragraf-paragraf sebelumnya.

Desa Sebagai Pijakan

Desa sebagaimana sering muncul dalam bayang imaji kita, ia sering kita bayangkan sebagai sesuatu yang ideal. Di ruang kultural ini, kita sering membayangkan imaji kebersamaan, gotong royong, kesederhanaan manusianya, kemandirian, juga kearifan (tradisional),



yang tak lagi kita dapatkan saat kita menghirup udara kebudayaan kota. Ia kita bayangkan sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang telah menyesap udara pengap suasana kejengahan kota. Ia seolah ingin ditempatkan sebagai saka guru kebudayaan yang menyambungkan kesinambungan dengan akar di masa lalu.

Bayangan ini tak sepenuhnya salah. Namun begitu, ada banyak yang telah berubah dengan desa kita. Sejak kita merdeka, kebijakan sentralisasi pendidikan, politik, ekonomi, juga kebudayaan, telah banyak memangkas kearifan, khazanah tradisi, kekayaan atau juga keunikan pengetahuan tradisionalnya (saya sebenarnya ingin menghindari istilah ini) yang kita gadang-gadang tumbuh dan berkembang dalam pertemuan kreatif dengan arus perubahan yang terus berdenyut. Namun, faktanya ia merupakan sesuatu yang ada di pinggir, atau karena *keterputusan* dinamika makna internal yang tak lagi dikenali, ia akhirnya terpinggirkan. Belum lagi jika melihat kebijakan pembangunan (modernisme) yang kadang memang dalam derajat tertentu sengaja didesakkan tanpa menimbang integrasi dan *ketersambungan* akar tradisional yang menyangganya, benar-benar telah membuat warisan-warisan yang menyangga bangun pandangan dunia masyarakat yang menghidupi ruang kultural ini berada di ruang *transisi*—atau dalam situasi “*keterbelahan*”—yang hingga kini tak pernah menemukan ruang pemecahan mendasar, di saat seluruh situasi, pranata sosial, serta daya dukung kultural-sosial telah banyak berubah di luar kendali kita.

Ini belum termasuk menimbang fakta perkembangan teknologi informasi global yang telah menyesaki praktik sehari-hari masyarakat desa kita hari ini. Sehingga hiruk pikuk deru silang riuh



teknologi informasi telah ikut menentukan arah perkembangan gerak perubahan yang tak lagi bisa kita elakkan. Maka lengkaplah *kegamangan* ini melanda di seujur penjuru kota hingga desa. Dan mungkin justru titik inilah relevansinya kita membicarakan desa sebagai saka guru kebudayaan penyangga.

Tema seminar seperti yang disodorkan panitia Kongres Kebudayaan ini membunyikan judulnya dengan gagah: “Kebudayaan: Merekonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru”. Mungkin judul ini ingin menegaskan satu hal: kebutuhan, atau sebut saja kerinduan untuk menyambung dengan akar masa lalu yang menyangga diri kita saat ini. Sebuah kehendak untuk tak mau terputus dengan akar, yang dalam tulisan saya di atas juga bisa dimaknai *keterputusan*, kebingungan, dan *keterbelangan* (karena tak lagi tersambung/ atau berjalan sendiri-sendiri), yang melalui cara itu, dibayangkan bangunan dasar kultural bangsa kita bisa berpijak pada dasar akar yang kokoh (dan dengan cara itu pula kita mungkin membayangkan gagasan kemandirian dan kedaulatan), yang darinya pada situasi baru ini, apalagi di era pandemik ini, kita punya daya pemaksa yang mengharuskan kita sebagai bangsa untuk menilik dan memeriksa ulang akar-akar yang menyangga kita tersebut, serta mendesak kita, terutama di saat krisis, untuk menengok ulang perihal arah praktik kultural mendasar kita yang bisa jadi telah menimbulkan krisis, bencana, dan pandemi. Dan di titik itulah membicarakan desa mungkin menemukan signifikansi dan relevansinya.

Akan tetapi, untuk melakukan tilikan ke belakang tersebut, saya ingin berbelok sebentar dan mengetengahkan temuan dalam



sebuah disiplin psikologi sosial. Dalam sebuah pendekatan baru dalam disiplin ini, tepatnya pada apa yang disebut sebagai teori *representasi sosial* yang dikenalkan dari disiplin psikologi sosial, ada sebuah temuan menarik yang ingin saya bagi. Terdapat asumsi dalam pendekatan teori ini yang mengatakan bahwa dalam menerima nilai, budaya, dan praktik baru (yang asing), sebuah masyarakat mempunyai perangkat *pengetahuan sosial* atau semacam *nalar sosial* untuk menerjemahkan, menanggapi, mengonstruksi ulang fenomena sosial tadi yang secara sosial kemudian disebarkan merata ke dalam masyarakat. Jadi, proses penerimaan nilai, pandangan, dan praktik hidup modern untuk mengambil satu contoh, tidak diterima melalui proses mental individual yang terpisah dari nilai-nilai masyarakatnya. Karena dalam koridor disiplin ini, *perilaku individu merupakan cerminan dari sistem pemikiran sosial dan sistem pemikiran sosial tersebut dibangun atas dasar kehidupan kolektif setiap individu sebagai bagian anggotanya*.

Dalam proses penerimaan nilai, pandangan, dan praktik modernitas, misalnya, masyarakat kita tidak mengunyah fenomena sosial bernama modernitas itu secara mentah semata. Masyarakat berusaha mengklasifikasi dan menamai realitas baru atau elemen-elemen asing dalam keseharian tersebut sesuai, sebut saja, dengan *repertoire* makna yang sudah dikenal sebelumnya.

Hal ini bermakna, pengertian modernitas yang menjadi identitas kita hari ini, justru dibentuk oleh katakanlah “pengetahuan awam” yang memandu individu, yakni dalam konteks sosialnya untuk mendekati makna maupun menafsir realitas bernama *modernitas* tersebut. Oleh karenanya, konteks kultural memainkan



peran utama. Karena “ruang budaya” seperti telah banyak kita ketahui merupakan wadah pengetahuan bersama yang tidak bisa disepadankan dengan prinsip kesahihan dalam konteks pengetahuan ilmiah. Atau dalam jalur lain, yang memandu kita dalam menerima, menyerap sistem pengetahuan maupun kebudayaan baru yang asing, bukan pertama-pertama ditentukan oleh justifikasi kesahihan penalaran ilmiah seperti di sekolah, melainkan respons “skema pengetahuan kultural sehari-hari” yang kemudian kita integrasikan dalam praktik keseharian masyarakat.

Dalam jalur ini, ruang budaya juga dipandang sebagai tempat endapan sistem nilai, ungkapan, penilaian sosial, sistem simbolik, mitologi, tradisi, agama, yang semuanya mengalir menyatu dalam bahasa. Bahasa orang kebanyakan dengan begitu merupakan wadah pengetahuan kultural bersama (pengetahuan awam) untuk menafsir, *mengapropriasi*, maupun menerjemahkan modernitas dalam praktik keseharian, pandangan, dan nilai masyarakat.

Dalam beberapa penelitian yang saya baca terkait pendekatan ini, menentang temuan yang menurut saya menarik. Karena bukan saja mengelak dari rumusan besar bahwa untuk menyongsong gerak modernitas dunia, masyarakat Dunia Ketiga dipaksa untuk memilah, meneliti, dan (pada akhirnya) menghilangkan hambatan tradisi kultural sebagai prasyarat menuju modernitas, melainkan masyarakat justru punya konsep sendiri yang masih berjangkar pada tradisi-kultur untuk *mengapropriasi* modernitas tersebut.

Modernitas, sebagaimana sering didengungkan, bagi masyarakat Dunia Ketiga, bukan merupakan sebuah “gerak dalam”, alias sebuah



gerak yang tidak lahir dari masyarakat itu sendiri. Ia lahir dari usaha untuk mengikuti gerak sejarah dunia agar ia tidak tertinggal dalam peradaban dunia. Oleh karena itu untuk mengatasi ketertinggalan peradaban tersebut, ia perlu mengubah ataupun menyesuaikan lapisan nilai tata-pemerintahan, ekonomi, maupun kulturalnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh Barat (sebagai acuan modern). Ini berarti dibutuhkan suatu pengetahuan acuan tertentu tentang Timur di segala aspeknya, yang senyatanya memang didefinisikan menurut kebutuhan Barat (modernitas). Inilah yang menjadikan kita sebagai bangsa yang terkurung dalam jebakan sejarah, sebuah jebakan yang membuat Dunia Ketiga tidak bisa kembali lagi ke keadaan semula; menemukan arah dan rumusnya sendiri.

Yang saya ingin katakan sebenarnya, pada level yang halus, di satu sisi terdapat sebut saja tingkat *keterhubungan* yang relatif sinambung dalam dinamika internal psikologis-kultural masyarakat, tetapi di sisi lainnya *pengetahuan kultural* atau *ruang kultural* tersebut tak pernah benar-benar diakui atau mendapat pengesahan justifikasi ilmiahnya sebagai norma yang diacu oleh setiap *kebijakan* pranata dan kebudayaan modern yang telah menjadi realitas faktual keseharian kita. Karena *pengetahuan kultural* ini diabaikan sekaligus tak terintegrasikan ke dalam bangun utuh sistem pengetahuan (pendidikan) dalam tubuh institusi modern pendidikan kita secara sinambung, alih-alih ke dalam bangun pranata dan struktur kebijakan publik modern kita (alias masih berdiri terpisah karena dianggap di seberang yang ilmiah/modern—*tradisional* dan selalu diperlawankan dengan yang *modern* [*tradisional vs modern*]), warisan pengetahuan ini tidak berkembang secara sehat, wajar, bahkan *distorsif*. Akhirnya



sebut saja *kearifan pengetahuan awam* ini mengalami patahan-patahan yang tak lagi terurus, yang dalam derajat tertentu mengalami *perumitan* ke dalam logika internalnya. Dan karena tak lagi menjadi inang kebudayaan yang menyangga bangun—atau dalam bahasa lain faktor *konstitutif*—bagi pengetahuan ilmiah (sistem pendidikan kita) yang menjadi norma bersama kehidupan modern, keadaan ini menyebabkan kondisi “*keterbelahan*” seperti saya maksud dalam paragraf-paragraf sebelumnya.

Belum ada usaha untuk memikirkan secara serius di tingkatan epistemologis, bagaimana “warisan-warisan” pengetahuan maupun kearifan tersebut, untuk mengangkatnya ke dalam derajat “ilmiah” tertentu ke level penelitian-penelitian serius, meski dalam kadar tertentu ia mempunyai kontradiksinya sendiri, yang dengannya menjadikannya di satu sisi berdiri “sejajar” yang layak dipertimbangkan proses pengaturan kebijakan bersama masyarakat, juga di sisi lain bisa menjadi “cadangan kearifan” yang terus dimaknai secara baru sesuai kebutuhan gerak perubahan “dinamis” masyarakat, yang secara faktual masih terus berusaha menjaganya agar tak punah. Karena dalam beberapa takaran khusus, pengetahuan tradisional tersebut—baik sebagai perasan nilai agama yang berserak dalam masyarakat maupun nilai religiositas yang telah tertubuhkan, terolah, dan termanifestasikan secara lebih spesifik dalam tradisi dan kebudayaan—masih belum tergantikan dalam menafsir secara eksistensial “kebermaknaan hidup” masyarakat dan masih menjadi penyangga bangun pandangan dunia (*world-view*) secara lebih utuh, meski ia terus saja terpinggirkan dalam deru nalar pengetahuan ilmiah modern yang telah mendunia. Nah, pada titik ini, desa



merupakan titik pijak juga titik berangkat yang tepat untuk memulai semua itu karena merupakan “oase” yang terus saja dengan setengah mati dijaga agar terus mengalir.

Kebudayaan sebagai Basis Sistem Pengetahuan

Penggalan kalimat “Merekonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru” seperti tertera dalam topik “Kebudayaan” dalam Kongres Kebudayaan Desa kali ini, menyiratkan (secara halus) sebuah usaha juga tekad untuk melibatkan gagasan alam pandangan dunia (Nusantara) yang sering kali diabaikan dan tak lagi diperhatikan, di saat rasionalitas modern (sains) telah menjadi imperatif moral maupun epistemologis yang dipandang *legitimate* atas seluruh praktik kehidupan publik modern kita, minimal dalam konteks keabsahan publiknya. Ia, alam pandangan Nusantara, sebagai sesuatu sistem pandangan dunia secara diametral memang berseberangan dengan ontologi materialistis-positivisme kehidupan modern, dipandang masih berdenyut dan menyangga bangun pengetahuan masyarakat dalam pengertian eksistensial hidup, tetapi ia kekurangan keabsahan legitimasi ilmiah publiknya karena tak lagi terintegrasi dalam tubuh sistem pandangan dunia pendidikan modern maupun praktik dan kehidupan modern secara umum, serta oleh karenanya dengan itu perlu untuk dilibatkan menjadi basis yang menopang akar kedirian bangsa, yang kita bayangkan akan mengantarkan kita perihal tegaknya kedirian karena disangga oleh akar yang kokoh



(kedaulatan). Dan lewat jalur arah pemaknaan inilah mungkin judul gagah di atas ingin diarahkan.

Belum lagi jika menimbang bahwa seluruh bangunan yang menyangga integrasi sosial-kultural, seperti nilai *gotong royong*, *harmoni*, *rukun*, *saling berbela-rasa*, *persatuan*, *kebersamaan*, *solidaritas*, *tepa salira*, *kesederhanaan*, *ketuhanan*, *musyawarah*, dan nilai penopang lainnya yang relatif menjaga diri kita dalam sebuah keutuhan sebagai bangsa, mungkin tidak pertama-pertama muncul dari sistem pandangan dunia modern beserta justifikasi ilmiahnya, melainkan ia pertama lahir dari bangun pandangan dunia Nusantara lama sebagai inang kebudayaannya. Ketertiban moral, kebersamaan, gotong royong, dan tolong-menolong misalnya, yang masih terus terselenggara dan bertahan di masyarakat ini bukan karena dorongan ketertiban hukum positif modern misalnya, melainkan lebih pada “warisan” kearifan dan hikmat-kebijaksanaan dari sistem pengetahuan atau pandangan dunia lama, yang masih mendasarkan konsep kemanusiaan sebagai suatu konsep yang bukan menegasi prinsip ketuhanan misalnya, sebagaimana dalam gagasan humanisme Barat, melainkan sebuah konsep kemanusiaan yang masih mendasarkan dirinya dan bertumpu kepada konsep ketuhanan.

Jika dan hanya jika konsep sistem pandangan dunia dan kearifan lama kita masih memandu perilaku sosial-kultural, minimal dalam pengertian eksistensial-ontologisnya pada masyarakat ini, kenapa seluruh bangun warisan sistem kearifan, perilaku, tradisi, dan norma-norma tradisional tersebut tak pernah menjadi nalar/kebijakan “arus utama” dalam kebijakan publik pengaturan sosial-kultural kita



sebagai bangsa? Mungkin faktornya, seperti saya telah jelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya, dikarenakan karena kegagalan proses re-integrasi kultural, atau proses penyelesaian masa transisi kultural yang hingga hari ini tak kunjung menemukan rumusan pemecahan masalah mendasarnya. Atau mungkin juga, karena proses reintegrasi kultural tersebut yang tak kunjung terselesaikan, menyebabkan warisan kearifan, pengetahuan praktik kultural, dan sistem norma-nilai sebagai hasil saling-silang pengaruh kebudayaan dan agama, benar-benar terabaikan, yang oleh karenanya menyebabkan “*keterputusan*” pengetahuan juga nilai dengan laju perubahan gerak modernitas, alias ia tak lagi berkembang secara wajar dan sehat, yang dalam derajat tertentu juga bermakna kehilangan konteks pemaknaan dinamis yang ikut men-*drive* gerak perubahan zaman. Maka dalam sudut optik ini, mau tak mau, jika kita masih menginginkan bangsa ini kokoh dan tegak berdiri dengan “akar” yang menopang kedirian bangsa (alias berdaulat dan mandiri), sebuah usaha untuk menggali, merekonstruksi, atau katakanlah mengilmui kembali alam pikiran Nusantara, atau bahkan sistem pandangan dunia, yang sebenarnya telah termaktub dan terkandung dalam dasar-filsafat (*philosophie grondslag*) Pancasila bangsa kita, sebagaimana diamanatkan oleh tema Kongres Kebudayaan Desa kali ini, sebenarnya telah menemukan relevansi kokoh pada dirinya.

Bahkan jika mau berlapang dada, nilai kemanusiaan yang didasarkan pada prinsip ketuhanan, sebagaimana tertera dalam dasar filsafat Pancasila kita, dalam galur rasionalitas pengetahuan ilmiah modern, ia tak menemukan justifikasi ilmiah-positivistiknya (ketuhanan dalam paradigma sains tidak dianggap sebagai fakta



ilmiah). Artinya saya ingin katakan, apa yang menopang nilai *gotong royong, persatuan, kemanusiaan, bahkan keadilan, dan kerakyatan* kita tidak pertama ditopang nilai rasionalitas modern yang telah mengokupasi sistem pendidikan dan kehidupan publik kita, melainkan disangga oleh warisan nilai-nilai kearifan, hikmat, dan kebijaksanaan (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan) yang merupakan resapan nilai agama (religiositas) yang telah menubuh dalam kebudayaan. Dan dari struktur sistem pengetahuan pandangan dunia lama jenis tersebut, sebut saja begitu, bangunan kokoh kebangsaan kita masih relatif tegak.

Sistem Pandangan Dunia Penyangga Nilai Integrasi Masyarakat

Saya ingin mengulang proposisi awal terkait desa bahwa ia merupakan saka guru kebudayaan yang menyangga bangun nilai-nilai besar yang mengikat integritas keutuhan kebangsaan kita yang masih berpaut dengan akar kultural masyarakat yang terus saja kita rindukan. Dan dari jalur ini, saya akan mengeksplorasi sekadarnya secara ringkas, tentu dikarenakan pembatasan dan keterbatasan panjang tulisan dalam kesempatan ini, yakni berkait gagasan nilai-nilai besar ini dalam keterkaitannya dengan nilai-nilai kultural yang berakar dalam sistem pengetahuan maupun sistem pandangan dunia lama yang terus saja mencoba bertahan. Saya akan mengelaborasi hal ini dari sudut sistem pengetahuan Jawa, atau sebut saja nalar



kebudayaan Jawa sebagai satu eksemplar—sebuah wilayah kultural yang paling saya akrabi—di mana nilai-nilai besar tersebut dalam derajat tertentu masih mendasarkan pada sistem pandangan kultural masyarakat.

Gagasan *kebudayaan* misalnya, seperti pada topik yang dipilih dalam acara Kongres Kebudayaan kali ini, tidak muncul pertama dari konsep masyarakat industri layaknya dalam tahapan sejarah masyarakat Eropa, yang sering menyorongkan kata *culture* yang lebih dekat pada makna *bercocok tanam* (*cultuur*/Belanda), alias semata dekat dengan olah peradaban materiel semata. Gagasan *budi*, *buddhaya*, atau *budya* atau bahkan *budi daya* (mendayakan budi), dalam tradisi masyarakat kita masih berkait dengan sesuatu yang rohani. Dalam khazanah “Serat Wedhatama” misalnya, laku mengolah budi (*amasah mesu budi*, mendayakan budi/budaya) sebagai sebuah laku mengolah seluruh dimensi lahir-batin fakultas yang membentuk kedirian manusia (yakni: karsa/raga, cipta, jiwa, dan rasa) adalah merupakan laku utuh *berkemanusiaan* itu sendiri dalam pengertian rohaniah, alias masih berpijak pada gagasan tentang sesuatu yang ilahiah (ketuhanan).

Proposisinya sederhana, laku mengolah seluruh empat potensi kemanusiaan ini adalah laku meng-*aktual*-kan potensi *ilahiah* yang secara fitrah ada dalam diri manusia, yaitu laku atau olah mengontrol atau menundukkan (1) *karsa* yang punya kecenderungan pada pemuasan kesenangan *egotis* sebagai sebuah disiplin ragawi yang berdampak rohani dan laku menajamkan (2) *cipta* untuk mengenali kebenaran dan kebatilan (kebermanfaatan), juga sebuah laku menjernihkan atau mengorientasikan kembali (3) *jiwa/kalbu*



arah kehidupan kita dalam perspektif yang lebih menyeluruh (tidak semata untuk tujuan hidup di dunia ini, tetapi juga hidup setelah mati), dan terakhir sebuah laku mengolah kepekaan (4) *rasa* mengenali keindahan, mengukuhkan kepedulian, empati, dan mengasah kasih sayang (*asah-asih*), yang darinya akan mengantarkan sedikit demi sedikit penyingkapan akan arah dan aliran (rahasia) hidup yang lebih utuh.

Jadi jika olah budi atau sebut saja olah mendayakan budi (karsa/cipta/jiwa/rasa)—Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai *hasil* cipta-karsa-rasa manusia, bukan *proses* (bandingkan dengan “Wedhatama”)—alias olah mengutuhkan kedirian manusia itu sendiri sebagai sesuatu yang bersifat rohani dalam pengertian terluasnya, maka tidak aneh jika dalam khazanah “Serat Wedhatama” ini laku mengolah empat fakultas diri ini alias olah budi atau budaya ini dinamai dalam term “*sembah*”: Sembah Raga (karsa/kehendak), Sembah Cipta, Sembah Jiwa, dan Sembah Rasa. Bahkan secara lebih eksplisit empat tahapan olah “*sembah*” ini (proses berkebudayaan) disepadankan dalam proses tahapan laku empat dalam gagasan pandangan dunia agama tertentu (Islam) bernama: *Syariat* (sembah raga), *Tarekat* (sembah cipta), *Hakikat* (sembah jiwa), dan *Ma’rifat* (sembah rasa)—artinya konsep kebudayaan sangat berpaut dengan agama, alias tak terpisahkan.

Jika kita bersepakat bahwa tujuan diturunkannya agama—saya mengambil contoh Islam—adalah untuk menantang manusia meningkatkan derajat kemanusiaannya dalam bingkai prinsip “kebebasan” (*ikhhtiyar*) yakni dari kondisi *basyariah* (derajat kehewan-an, alias masih menuruti dorongan natural-hewani-



nabatinya) menuju derajat kemanusiaan utuh (*insaniyah*) yang telah mengatasi hambatan (kecenderungan) *natur*-nya maka ajaran agama tak lain adalah proses berkebudayaan itu sendiri, alias proses mengutuhkannya olah *berkemanusiaan* itu sendiri, yakni sesuai kecenderungan dorongan “fitrah” (dorongan kepada yang lurus/kebaikan, keindahan, dan lain-lain, alias dorongan ilahiah) yang tidak lain adalah sebenarnya nama lain “ajaran” yang ingin disorongkan oleh agama. Oleh karenanya kita sering mendefinisikan kebudayaan sebagai usaha keluar dari kondisi *nature* (*basyariah*) menuju *culture* (*insaniyah*).

Dari seluruh olah/laku “proses berbudaya” tersebut, seperti ditegaskan oleh “Wedhatama”, muara puncaknya adalah meningkatnya proses *berkemanusiaan* menuju kualitas “manusia utama” (*janma utama*) atau manusia berbudi utama. Di Sumatra, Bugis, dan Makassar, pada masa awal islamisasi Nusantara, kita tahu gagasan *insan kamil* (manusia paripurna/utama/utuh) merupakan ajaran pokok yang telah menyebar dan membentuk struktur pandangan dunia Nusantara. Maka kita sering mendengar bahwa kata *budi* (akar dari kata *budaya*) sering dikaitkan dengan *akhlak* dan *perbuatan baik* (akhlak-budi-pekeriti). Bahkan kita juga dapat menghubungkan kata *kearifan* (dari kata *arif*, seakar kata dengan *ma’rifat* sebagai padanan dalam tahapan “sembah Rasa” yang telah saya jelaskan) dengan istilah lain *adat* (alias salah satu dimensi kebudayaan) yang dalam bahasa Arab-nya berbunyi *urf* (adat atau *arif-urf-ma’rifat*). *Adat* atau *urf* (produk kearifan) (ingat istilah ini dari bahasa Arab: *addat-isti’addat*) adalah pengetahuan/kearifan (*ma’rifat*) atau nilai-nilai kebaikan yang telah termanifestasi dalam



proses olah-kemanusiaan masyarakat sesuai tantangan partikularnya (manusia Jawa, manusia Sunda, manusia Nusantara, dan lain-lain) sebagai produk *kearifan* atau *kebijaksanaan* dalam menerjemahkan secara lokal nilai-nilai universal keagamaan yang dianutnya. Nama-nama seperti Arif Budiman, Arif Wicaksono, menyiratkan akan gagasan pandangan dunia perihal gagasan sekaligus doa yang disematkan orang tua yang muncul dari struktur pandangan dunia terkait gagasan olah-kemanusiaan tersebut.

Makanya, seperti saya telah tekankan di paragraf sebelumnya, bahwa konsep *kemanusiaan* atau sebut saja gagasan “menjadi orang” (*dadi wong*) selalu terkait dan disandarkan pada konsep *ketuhanan*, seperti dirumuskan dalam Pancasila, yang berseberangan dan melawan prinsip “*humanity*” sebagai gagasan yang menegasi (atau minimal berdiri berseberangan dengan gagasan) (ke-)tuhan(-an). Dan dalam olah proses *berkemanusiaan* tersebut, kebudayaan sungguh tak terpisahkan dari gagasan agama. Malah saya menemukan, jika kebudayaan kita artikan dalam maknanya sebagai sistem pengetahuan (ide dan makna)—selain makna lain sebagai sistem perilaku (pranata) dan produk budaya, laku olah kemanusiaan mengaktualkan empat fakultas kedirian manusia itu (*budaya*), disebut “Wedhatama” sebagai “laku berpengetahuan” atau “laku berilmu” itu sendiri. Dalam sebuah *adigium* yang cantik, “Wedhatama” menyebut: “*Ngelmu iku kalakone kanthi Laku,*” ‘ilmu itu tercapainya melalui laku-*berkemanusiaan*’. *Laku* di sini, tidak pertama-tama terkait makna *praktik* atau *mempraktikkan* sebagaimana dipahami secara sederhana oleh orang kebanyakan (ini hanya separuh benar), tetapi sebagaimana dieksplicitkan dalam Serat



ini adalah laku mengolah unsur kemanusiaan (olah kemanusiaan) atau mengolah empat fakultas kemanusiaan: (1) karsa/raga (*amagang Laku*), (2) cipta (*laku*), (3) jiwa (*pepunting laku*), (4) rasa (hasil *laku*, sudah tak ada lagi petunjuk).

Yang ingin saya katakan, proses menjadi manusia (berbudaya) dalam galur sistem pengetahuan ini merupakan laku berilmu itu sendiri, dan ujung dari olah ini adalah kearifan dan kebijaksanaan, budi pekerti, dan akhlak. Makanya dalam istilah tradisi, kata *sarjana* (dari bahasa Jawa) yang dalam perbendaharaan kesusastraan *serat, suluk, dan babad*, sering dimaknai sebagai “orang yang telah tuntas/selesai dalam olah fakultas kemanusiaannya” (*wong kang wus putus ing olah ngelmi/budi*). Istilah ini sekaligus berbeda dengan istilah *sujana* (orang yang telah mengetahui banyak hal, tetapi belum bisa menubuhkan dalam proses *berkemanusiaan*-nya secara paripurna). Makanya istilah capaian berpengetahuan atau berilmu selalu diandaikan berkait dengan peningkatan kualitas kedewasaan moral-rohani-akhlak seseorang. Orang seperti ini dipandang sudah “*sepuh*” (dewasa/*disesep ampuhe*) karena telah bisa bersikap *arif* karena telah mengenali dan menempatkan kebenaran secara adil “sesuai tempatnya” dalam jaring bangun-susun kebenaran yang lebih utuh dan menyeluruh (*bener durung mesti pener/becik*). Dan orang yang telah mengenali pengetahuan ini dalam olah *berkemanusiaan* dalam *lakul lelakon/lelaku* hidupnya dikatakan telah mendapat pengetahuan *hikmah, kearifan, dan kebijaksanaan*.

Oleh karenanya, konotasi berilmu selalu berkait dengan gagasan kedewasaan. Dikatakan seseorang “telah menjadi orang” atau “*dadi wong*” (kemanusiaan), bisa merujuk orang yang berpengaruh,



atau orang yang memiliki posisi atau jabatan tinggi misalnya, sebenarnya ingin menunjuk perihal besar tanggung jawab moral yang diembannya, maupun kedalaman pengetahuannya yang menubuh sebagai tempat sandaran orang banyak (yang dipimpinnya), alias telah “tegak” dan mandiri (baik secara pengetahuan, ekonomi, moral, maupun rohani), sebagai hasil dari proses olah *berkemanusiaan*-nya. Pada istilah yang berkebalikan dengan “menjadi orang” (*dadi wong*) kita juga mendapati istilah “*durung jawa*” (belum Jawa/mengerti) yang sering dikontasikan pada sikap atau perilaku anak-anak atau kekanak-kanakan karena masih terbelenggu sikap *egotis* “menang sendiri” atau “benar sendiri” yang berlawanan dengan prinsip pengaturan kehidupan bersama yang didasarkan pada prinsip menanggalkan sikap “mementingkan diri sendiri” dan individualisme. Hal itulah yang menyebabkan, dalam tradisi kita, khususnya Jawa, dalam level kebudayaannya, dipenuhi istilah *nanding-sarira* (membandingkan antardiri), *ngukur-sarira* (mengukur diri), *tepa-salira* (menakar diri dari sudut pengetahuan, rasa atau kebenaran orang lain/alias merasakan rasa orang lain/tenggang rasa), hingga *mulat sarira* dan *mawas diri* (mengawasi atau mengenali diri sendiri) yang sebenarnya merupakan, katakanlah, tahapan proses *berkemanusiaan* diri yang tidak mungkin berhasil tegak tanpa proses memanusiakan (baca: *nguwongke*) manusia lain dalam kebersamaan hidup (gotong royong) yang memang secara ontologis saling mengandaikan.

Keberhasilan dalam olah-kemanusiaan untuk mencapai kedewasaan (alias telah mampu ber-*tepa-salira* [tenggang rasa], mandiri [*dadi wong*], dan mengatasi sikap “mementingkan diri



sendiri”) inilah yang menyangga bangun *persatuan*, *kebersamaan*, dan prinsip *gotong royong* ataupun *kerukunan*. Oleh karenanya dari sejak awal saya katakan bahwa olah-kemanusiaan (prinsip kemanusiaan) yang didasarkan pada prinsip ketuhanan (prinsip ketuhanan) dalam nalar pengetahuan ini akan mengantarkan pada kondisi *persatuan* dan *gotong royong* (prinsip persatuan). Bahkan sebagaimana olah *berkemanusiaan* yang bertujuan pada usaha penanggulangan sikap “mencari benar sendiri” (alias telah melampaui *egotisme* individualnya, alias bersikap *adil* pada dirinya sendiri) maupun proses olah kemanusiaan yang berujung pada budi-peker-ti-utama atau “*adab*” maka kalimat sila Pancasila “Kemanusiaan yang *adil* dan ber-*adab*” punya titik hubung relevansi makna dengan proses *berkemanusiaan* (berkebudayaan) seperti yang telah saya elaborasi.

Dan ini ditambah penegasan sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh *hikmat* dan *kebijaksanaan* dalam permusyawaratan perwakilan” yang hanya mengafirmasi saja elaborasi yang telah saya kemukakan. Karena proses berkebudayaan (olah kemanusiaan) sebagai sebuah proses berpengetahuan itu sendiri, di mana dalam laku mengutuhkan kedirian kemanusiaan seseorang akan mengantarkan pada capaian pengetahuan *kearifan* atau *kebijaksanaan*, maupun *hikmat*, alias proses menerjemahkan kebenaran dalam konteks pergulatan kemanusiaan yang spesifik dan partikular keindonesiaan, atau telah berhasil menempatkan kebenaran pada “porsi” dan “tempat”, dan “takaran”-nya karena telah menyisihkan sikap “menang sendiri” (alias telah *arif*, bijak, *kebijaksanaan*) karena dipandu dalam payung musyawarah untuk mencegah dorongan ingin “benar sendiri” atau “semaunya sendiri”. Dan pada pandu “*hikmat*”, “*kebijaksanaan*”



(kearifan) inilah bukan hanya prinsip “kerakyatan” kita arahkan, melainkan dari jalan ini gagasan *adil*—ingat kata ini berakar dalam istilah Al-Qur’an (*’adl*)—bisa terselenggara (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Karena bagaimanapun, sikap mencari “benar sendiri” maupun “semaunya sendiri” (alias berangkat dari *egotisme* dan menafikan kebersamaan/gotong royong) akan menjadi penghalang terbesar mengenali sesuatu sesuai “porsi” dan “tempat”-nya dalam jaring “kebenaran” hidup secara lebih menyeluruh (*kearifan*), apalagi dalam usaha untuk menempatkan, mendudukkan, atau menciptakan kondisi sesuai tatanan sesuai “porsi”, “takaran”, “tempat”-nya sebagaimana dikandung dalam istilah *adil* seperti yang ingin diusahakan (*keadilan*). Dan dari proses olah *berkemanusiaan* ini, keadilan sosial tak mungkin terselenggara, tanpa pengandaian nilai “*adil* terhadap diri sendiri” yang dicapai dari keberhasilan olah *berkemanusiaan* (Kemanusiaan) atau berkebudayaan yang menuntun usaha memanusiaikan manusia lain (Persatuan), dalam rangka mengaktualkan “fitrah” kebenaran “ilahiah” yang tertanam dalam diri yang selaras serta dikukuhkan oleh kebenaran ajaran agama kita tersebut (Ketuhanan).

Nah di penghujung tulisan ini saya ingin katakan, nilai-nilai besar yang menopang bangsa ini sebagaimana telah saya elaborasi di atas ternyata disangga oleh bangun sistem pandangan dunia lama, sebut saja begitu—dalam istilah topik Kongres Kebudayaan Desa ini dibahasakan dengan istilah *Alam Pikiran Nusantara*—yang lambat laun tidak lagi kita kenali, atau alih-alih kita ilmui, atau bahkan kita



singkirkan, yang sebenarnya masih berdenyut secara halus dalam ruang kesadaran dan alam pikiran bangsa ini. Dan saya kira, desa merupakan ruang kultural tempat nilai-nilai besar yang menopang bangsa tersebut masih terus dijaga dan dipertahankan, meski ia juga pada sisi lain terus saja terdesak ke pinggiran.

Di masa pandemik ini, mungkin banyak orang tersadar betapa bangun tata sosial politik bangsa kita begitu lembek dan rapuh. Juga pada takaran tertentu, rajutan kultural kebersamaan masyarakat, kita rasa tak setangguh dulu. Orang-orang dipaksa untuk merenung sekaligus memikirkan, juga teragap-gagap pada saat bersamaan, ihwal tata kebiasaan baru yang mungkin tak punya presedennya di belakang. Harus ada usaha serius untuk memikirkan bangun integrasi kultural dalam pengertian mendasarnya, yang bukan hanya untuk mempersiapkan tata *new normal* semata, melainkan juga untuk mengusahakan penyelesaian masalah “transisi kultural” yang telah saya sebut di awal tulisan ini. Karena tanpa usaha ulang untuk mengilmui kembali nalar pandangan dunia masyarakat ini, yang sebenarnya secara faktual masih menyangga bangun kedirian kita sebagai bangsa, dan kemudian mengenali “warisan” kearifan pandangan dunia lama tersebut beserta turunan praktik kulturalnya, juga sekaligus mendudukkannya dalam dialektika yang dinamis dalam arus perubahan dunia modern dunia, kita akan terus-menerus terseok-seok, alih-alih berdiri berdaulat di tengah arus perubahan yang tak sepenuhnya kita kendalikan.

Kenapa saya tak melulu berfokus pada tata nilai baru atau oleh orang banyak disebut *new-normal* itu karena dalam cara pandang tradisi hal itu punya nilai dan makna lain, yang dari cara pandang



tersebut mengakibatkan cara *penanggapan* dan penyelesaian lain atasnya. Bencana besar pagebluk yang hari ini melanda dunia—kamus Bausastra Poerwadarminta mendefinisikan pagebluk sebagai masa di mana banyak penyakit menular (*ungsum lelara nelular*)—dalam kacamata tradisi adalah sebuah peristiwa siklik (*cakramanggilingan*), alias terjadi sebuah pergerakan kosmis berulang dari suatu kondisi menuju kondisi lain seperti dalam adegan *gara-gara* dalam pewayangan. Dan orang bersikap, setelah *gara-gara* reda (*sirep*), bukan untuk kembali pada keadaan semula, melainkan telah terbarukan dan siap menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Dan kesiapan itu dicapai dengan mengubah kedirian kita yang juga ikut terbarukan, lewat proses “laku rohani” (*tapa*) yang mengubah.

Dari struktur nalar ini, pagebluk, bencana, ataupun pandemi, harus menggeret orang untuk menengok kedirian dan masyarakatnya. Karena pengandaianya, jika terjadi huru-hara atau bencana pada *jagad gede* kita, pasti ada yang tak beres dari *jagad cilik* rohani diri kita. Pasti ada ketidakberesan rohani yang gradasinya bermuara menaik menuju para orang-orang kunci yang menentukan praktik kehidupan bersama, yang menyebabkan guncangan kosmis ini. Jika jagat rohani kita dipenuhi *keserakahan*—yang menyebabkan nalar eksploitasi di luar kendali atas lingkungan maupun atas manusia lain, atau *ketidakjujuran* atau *menang-sendiri*, juga kondisi rohani *tak amanah*—yang menyebabkan aturan bersama yang muncul justru menimbulkan perpecahan, maraknya perselisihan, atau suburnya kebencian, dan masih banyak lainnya, maka kita diminta berbenah. Pasti ada yang *mesle* dari cara berelasi kita (dunia ini) terkait alam, manusia, dan juga Tuhan, alias ada yang salah dari proses olah



berkemanusiaan atau berkebudayaan kita, bahkan di dunia ini, secara lebih mendasar. Dan mungkin inilah saat yang tepat untuk mengevaluasi olah-*berkemanusiaan* atau olah-berkebudayaan kita bersama sebagai bangsa, yang juga bisa menjadi sumbangsih atas dunia, atau bahkan merupakan titik krusial yang sebenarnya menjadi prasyarat menyemai kemandirian dan kedaulatan kita sebagai bangsa, dan (akhirnya) saya kira desa merupakan titik pijak yang tepat untuk memulainya.

(Makalah ini disampaikan dalam acara Kongres Kebudayaan Desa 2020, 6 Juli 2020, Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggunharjo, Yogyakarta 55188)

Cepokpojajar, Bantul, 1 Juli 2020

Profil Penulis

Irfan Afifi. Seorang penulis sekaligus seorang budayawan muda. Ia merampungkan kuliahnya pada tahun 2007 di Fakultas Filsafat UGM. Ia juga sempat mencicipi kuliah di Sastra Arab, Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, meski tak ia rampungkan. Selama kuliah di UGM, ia aktif di pers kampus BPPM Balairung UGM. Dari keterlibatannya ini, ia terasah menulis, terlibat aktivisme mahasiswa, dan pergerakan.

Akan tetapi, karena ketertarikan pada tradisi dan pemikiran Nusantara, ia kemudian mendirikan sebuah Lembaga Ifada Initiatives (Khazanah Pemikiran Nusantara) bersama-sama teman-temannya.



Namun, belakangan lembaga tak bertahan lama. Ia lalu mendirikan media kebudayaan Langgar.co (Suluk Kebudayaan Indonesia) yang juga diikuti mendirikan penerbitan bernama Buku Langgar. Ia juga seorang kolumnis di Mojok.co, penulis di beberapa media daring, serta penggerak kajian Tradisi, kebudayaan, Islam, Kejawaan, dan Kebangsaan di lembaganya.

Beberapa karya tulisnya di antaranya: *Saya, Jawa, dan Islam* (TandaBaca, Yogyakarta, 2019); *Habermas, Senjakala Modernitas* (Ircisod, 2019); *Bukan Tersembunyi, Melainkan Tak Terlihat* (Omah Ilmu, 2019); serta menjadi editor buku untuk Nancy K. Florida dengan judul *Jawa-Islam di Masa Kolonial, Suluk, Santri, dan Pujangga Jawa* (Buku Langgar, 2020).





Teologi Desa: Sebuah Tawaran Wacana¹

Hairus Salim HS

I

Gagasan ini bertumbuh dari kegiatan pendampingan dan pergaulan kami dengan saudara-saudara penghayat di sekitaran Yogyakarta. Para penghayat, salah satu sebutan yang dialamatkan kepada mereka yang menganut ajaran leluhur di luar enam agama resmi, jumlahnya kini tidak banyak lagi dan sangat kecil. Jauh

¹ Disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Desa 2020, tema "Kebudayaan", Senin, 6 Juli 2020.

merosot dibanding dua hingga empat dekade lalu. Politik kebijakan agama yang diberlakukan pemerintahan Orde Baru dan terus meninggalkan jejaknya hingga kini, membuat mereka tersingkir dan mengalami marginalisasi.

Para penghayat ini—mungkin bukan kebetulan—kebanyakan tinggal dan tersebar di berbagai sudut perdesaan. Dan bisa dikatakan mereka adalah *penghuni asli* desa. Meski jumlah mereka minor dan tidak signifikan, pandangan mereka sebenarnya sangat signifikan dan penting, serta bisa menjadi titik masuk untuk menengok kebudayaan desa.

Salah satu dari pandangan itu adalah terhadap alam dan lingkungan. Sudah tak perlu lagi diulang bahwa salah satu tuntutan yang besar terhadap desa adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Namun paradoksnya, sering korban pertama dari pembangunan desa adalah alam lingkungan itu sendiri.

Kalangan penghayat memiliki pandangan yang sangat kuat pada orientasi menjaga alam dan lingkungan. Mereka percaya, alam dan lingkungan itulah yang bisa memberikan kesejahteraan pada mereka. Karena itu mereka, misalnya, sangat menghormati dan sangat menjaga sebuah pohon besar dan sumber air di bawahnya melalui berbagai tabu dan gelaran upacara secara berkala.

Saya ingat sebuah lelucon teman saya orang Dayak. Sebuah pohon besar ia yakini akan tetap bertahan kalau masih di tangan orang Dayak yang masih menganut kepercayaan leluhur. Namun, pohon besar itu tak akan berumur lama kalau sudah berada di tangan si Abdul atau si Johanes. Ini adalah sebuah kalimat tajam



penuh sindiran, juga ungkapan keprihatinan yang dalam. Seperti orang Dayak yang digambarkan teman itu, tidak mudah juga bagi kalangan penghayat untuk menebang sebatang pohon besar, mengotori mata air, merusak hutan, dan mungkin dalam beberapa hal juga melepaskan tanah. Banyak tabu digariskan untuk menjaga alam lingkungan.

II

Pada bagian berikut saya ingin mengingatkan tentang sebuah kecemasan dan kegelisahan di kalangan komunitas pesantren atau muslim perdesaan secara umum akhir-akhir ini. Sumber kecemasan dan kegelisahan itu adalah makin tergerusnya tradisi-tradisi keagamaan dan kebudayaan yang sebagian berkait dengan siklus kehidupan, seperti upacara-upacara mengiringi kelahiran, kematian, dan lain-lain.

Seperti kita banyak tahu, yang duduk sebagai terdakwa atas terjadinya penggerusan upacara-upacara tradisi keagamaan ini adalah kelompok-kelompok yang disebut Wahabi yang memang masyhur sikap keagamaannya yang antitradisi lokal.

Kini sebagai bagian dari kesadaran untuk mempertahankan tradisi dan upacara keagamaan, saudara-saudara muslim dari kalangan pesantren ini mempertahankan dan melawan gerakan Wahabi ini. Tentang ini kita sudah tahu banyak. Namun, benarkah karena faktor Wahabi sepenuhnya? Kita tunda dulu jawaban ini.



III

Para penghayat dan saudara-saudara muslim pesantren di atas adalah dua tipe masyarakat yang menjadi penduduk kawasan perdesaan. Keduanya memang memiliki kepercayaan teologi yang berbeda, tetapi dalam *orientasi nilai* atau pandangan terhadap *good life*, memiliki kemiripan. Meminjam pandangan Robert Redfield yang sudah klasik terhadap masyarakat petani, kedua kelompok masyarakat ini mungkin bisa dimasukkan dalam tipe masyarakat dengan *low tradition* (tradisi kecil) yang berbeda dengan masyarakat *high tradition* (tradisi besar). Yang pertama dianggap sangat sederhana, berlangsung di dalam hidup itu sendiri dan kalangan yang *relatif tidak terpelajar* dalam komunitas desa. Sebaliknya, yang kedua, pandangan yang canggih, yang berasal dan diolah dari sekolah-sekolah dan kuil-kuil.

Pandangan Redfield ini telah banyak dikritik karena terutama dianggap *simplistik*. Lebih-lebih sekarang, ketika desa mengalami perubahan yang luar biasa dalam hampir setengah abad ini. Pada kenyataannya, keduanya bisa saja bertukar. Namun, jika kita merenungkan lebih dalam dan dengan beberapa modifikasi, tesis Redfield ini bisa membantu menjelaskan satu celah penting dalam kehidupan petani khususnya dan orang desa umumnya yang sering diabaikan dan dilupakan, yaitu *pandangan dunia* atau *orientasi nilai* yang dalam tataran tertentu mungkin sudah merupakan suatu *teologi*.

Jika kita perluas pandangan Redfield maka pada umumnya masyarakat desa pada dasarnya memiliki tiga sikap atau nilai: pertama, sikap yang intim dan akrab pada tanah dan juga air, serta



lingkungan secara umum. Kedua, gagasan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan tanah dan air itu, bertani dan berladang, sangat mulia dan baik. Sementara perdagangan dipandang lebih rendah. Ketiga, penekanan pada kegiatan produktif sebagai kebajikan utama.

Pandangan di atas diekspresikan di antaranya dalam kegiatan-kegiatan yang berisi pada penghormatan terhadap alam dan lingkungan. Karena lewat alamlah rezeki dan karunia bisa diperoleh maka harapan dan syukur kepada Tuhan diungkapkan melalui upacara-upacara yang menghormati alam. Pemujaan terhadap tokoh-tokoh suci yang dipandang memiliki kekeramatan dan relasi yang masih terpelihara dengan roh-roh orang yang sudah meninggal, menjadi bagian dari praktik keagamaan-kebudayaan. Demikian juga dengan kepercayaan-kepercayaan kepada jimat, kesaktian, doa, zikir, jampi-jampi, histeria, kesurupan, pemakaian tarian, penggunaan obat tradisional, dan lain-lain.

Itulah bagian dari *tradisi kecil* tersebut. Tradisi itu, jelas berbeda dan bertentangan dengan kalangan urban perkotaan dan kalangan terpelajar yang dipandang lebih rasional dan memperhitungkan untung rugi segala sesuatu secara ekonomis, serta sudah barang tentu relatif tidak percaya pada hal-hal magis-mistis. Tentu ini pembelahan yang sederhana dan umum. Pada kenyataannya, pasti tidak sesederhana itu. Orang desa, bisa jadi banyak yang memiliki pandangan *tradisi tinggi*, sebaliknya orang kota bisa saja memiliki pandangan yang berorientasi *tradisi kecil*. Antara keduanya bisa saling tergantung dan saling memberi. Atau antara keduanya bisa saja berbaur dan bercampur dalam diri seseorang, tetapi yang hendak dilihat adalah kecenderungan umum.



Sebagai contoh saja, sebuah studi baru-baru ini menunjukkan masih bertahannya pandangan ini di kalangan penduduk desa, para petani kentang di kawasan pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Di kalangan sebagian besar petani ini ada kepercayaan agar produksi kentangnya bagus dan hama tidak menyerang maka perlu ada rajah merah yang dibenamkan pada ladang kentang agar tidak mengalami kendala produksi. Rajah merah itu adalah mantra terbungkus kertas merah yang diberikan—biasanya—oleh seorang pemuka agama.

Bisa kita katakan bahwa kepercayaan seperti di atas jelas khas petani dan desa. Kita bisa mendaftar dan mengidentifikasi lebih banyak lagi praktik-praktik tradisi kecil ini. Artinya kalau tidak ada tanah yang digarap, air untuk menyiram, dan singkatnya alam lingkungan ini, tentu tidak akan ada kepercayaan itu. Kepercayaan itu lahir dan memiliki basis sosialnya, bukan muncul dengan sendirinya.

Dalam hal ini mungkin kita bisa menjawab bahwa tergerusnya tradisi dan upacara keagamaan kalangan muslim tradisional, bukan semata karena penetrasi kalangan Wahabi, melainkan bisa jadi juga karena hancurnya basis sosial, alam, dan lingkungan yang membentuk pandangan tersebut. Usaha untuk mempertahankannya karena itu, tidak semata menahan laju dan melawan pandangan Wahabi, tetapi juga mempertahankan basis-basis sosial itu. Pada kenyataannya inilah yang tidak mudah. Karena sebagai *mafhum mukhalafah* dari hal ini adalah ketika orang-orang desa ini pergi ke kota, menjadi buruh misalnya, hampir pada saat yang bersamaan terjadi *konversi* pandangan keagamaan ini. Sesuatu yang mungkin tak bisa dihindari karena memang basis sosial untuk memegangi



pandangan tradisional keagamaannya memang sudah tidak ada lagi. Penting dicatat bahwa proses industrialisasi bisa jadi mendahului, atau setidaknya beriringan dengan proses purifikasi pandangan keagamaan.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan produksi masyarakat desa, dengan alam lingkungannya yang intim, pada dasarnya memiliki bobot religius. Namun dalam praktiknya keduanya sering kali dipisahkan. Kegiatan-kegiatan produksi dan segala sesuatu yang mengiringi dan menyertainya dipandang sebagai kegiatan sekuler semata. Sementara kepercayaan-kepercayaan keagamaan yang menopangnya dibiarkan berdiri sendiri. Dalam kasus kalangan pemeluk kepercayaan leluhur, dibatasi, tidak diakui, bahkan diberangus.

Di kalangan masyarakat Meratus di Kalimantan Selatan misalnya, yang menganut Agama Bukit, secara fungsional-struktural tampak sekali hubungannya dengan tradisi berladang. Hampir seluruh upacara keagamaannya berkait dengan siklus perladangan. Karena itu, jika perladangan ini hancur maka bisa dikatakan tergerus juga kepercayaan dan Agama Bukit ini. Sebaliknya, ketika upacara-upacara itu diambil dan diringkus menjadi pertunjukan wisata maka ia tampak artifisial sekali karena basis sosialnya—berladang—hilang di dalamnya.

IV

Dengan pemaparan yang fragmentaris di atas, mungkin sekarang bisa direfleksikan suatu pemikiran sederhana: bagaimana



mengembalikan lagi jiwa desa, yaitu keyakinan-keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan religiusnya sebagai bagian penting dari praktik-praktik produksinya. Keduanya tidak boleh dipisahkan dan harus menjadi bagian integral. Di dalam konteks kebudayaan, mungkin perlu dilakukan revitalisasi dan invensi. Namun, saya ingin menarik lebih jauh dan melampaui, dengan menganggap ini sebagai semacam teologi, jadi katakanlah *teologi desa*.

Teologi yang saya maksud di sini bukan suatu wacana *metafisis* yang mengawang-awang. Teologi juga bukan sesuatu yang jauh di atas sana, tetapi sesuatu yang nyata di sini. Teologi di sini adalah suatu yang membentuk kehidupan ini dan menjalaninya.

Selain itu, teologi di sini juga memiliki makna yang luas dan umum. Bukan khusus agama tertentu saja, melainkan mencakup semua kalangan. Sebagaimana banyak studi menunjukkan, hampir semua masyarakat petani desa memiliki pandangan yang, dalam dunia antropologi, sering disebut sebagai *orientasi nilai* atau *pandangan tentang kehidupan yang baik*. Pandangan keagamaan ini sendiri merupakan bagian dari unsur kebudayaan. Atau bisa juga semacam adat, seperti yang telah banyak dibakukan menjadi *hukum adat*. Namun, karena makna dan bobotnya, ia lebih dari sekadar pandangan kebudayaan, ia sebenarnya suatu pandangan teologi.

Dengan menyebut teologi, dilekatkan di sana makna dan bobot religius, maka sumber daya alam akan dipertahankan sebagaimana umumnya orang mempertahankan keyakinan agama. Sumber daya alam diolah seperti keseriusan dan kekhusyukan kalangan beragama menjalankan ibadah. Sawah, ladang, hutan bisa



jadi sama sucinya dengan rumah ibadah. Karena ia bukan milik manusia, melainkan milik Tuhan. Kesetiaan pada proses produksi laksana kesetiaan seorang *penganut sejati*. Usaha untuk menjalankan proses dan kepasrahan menerima hasil adalah dinamika iman dan kepercayaan. Sifat komunalisme, tolong-menolong, gotong royong, dan musyawarah menjadi bagian dari karakter teologi desa ini.

Ada banyak kajian yang menunjukkan daya tahan kehidupan desa dengan segala sumber daya alam dan lingkungannya ditopang oleh pandangan teologinya. Sebagian dari masyarakat ini, telah memiliki seperangkat aturan, terutama yang berkaitan dengan adat. Solidaritas dan soliditas masyarakat terbentuk dengan segera ketika pandangan teologi ini terganggu dan terancam. Solidaritas dan soliditas itu terbentuk karena motif-motif yang berbobot religius di dalamnya. Sebaliknya, ketika ia menjadi suatu yang sekuler, solidaritas dan soliditas itu menjadi pecah karena orang-orang bergerak berdasar kepentingan sendiri-sendiri.

Demikian sekadar tawaran perbincangan. Ia baru semacam celetukan, perlu elaborasi lebih lanjut dan luas. Seperti saya katakan di depan, tawaran ini sebagian besar berasal dari refleksi berteman dan bergaul dengan kalangan adat, penghayat, dan warga desa kebanyakan.

Profil Penulis

Hairus Salim HS . Ia adalah Direktur Yayasan LKIS, penulis dan pemikir kebudayaan. Pendidikan terakhir adalah Pascasarjana Antropologi Universitas Gadjah Mada.



Pengalamannya sangat luas, di antaranya, bersama YLKIS mendampingi kalangan penghayat di kawasan desa-desa di Kulon Progo dan Gunungkidul, Yogyakarta; menggagas penulisan sejarah desa di Desa Salamrejo, Kulon Progo (2015-sekarang); melakukan beberapa kegiatan pemetaan budaya di desa-desa di kawasan Candi Borobudur (bersama UNESCO, 2018-2020); menjadi konsultan Program Peduli untuk pendampingan kalangan penghayat di Sumba, Sumatera Utara, NTB, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan (bersama The Asia Foundation); dan juga pernah menjadi Staf Ahli Kemendes 2016-2017; melakukan riset tenun di NTB (2018) dan Toba, Sumatra Utara (2019-2020).





Epilog

Kongres Kebudayaan Desa

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:

Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Ryan Sugiarto

(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,

Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)

Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi

Tepat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggungharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer, mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19. Ruangan ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa

Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laporan dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasar.desa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat



dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengukung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

Memahami Situasi di Tengah Pandemi

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia



miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu)



dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjut maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19¹.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepihnya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan,

1 Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.



pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyheramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK².

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun³.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada

2 Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

3 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.



kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggungkan pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.



Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkan manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?



Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan. Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal



abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabatan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *rubiyah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada



sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.



Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat denganarganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.



Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.

Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujudkan. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai



bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah sengkabut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi



sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya,



layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”⁴

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

4 Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.



Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.



Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20 tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan

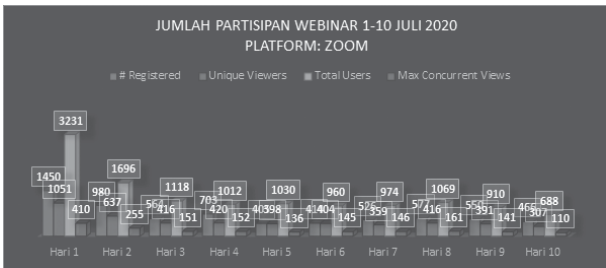


dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.



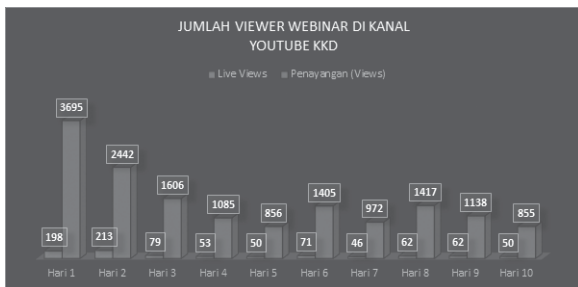
Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

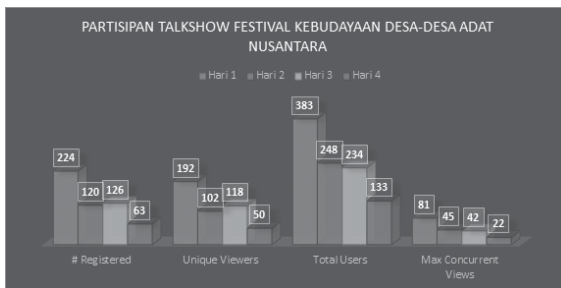
Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube



Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

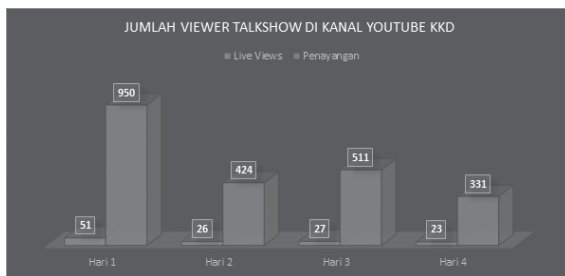
Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom



Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.

Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube

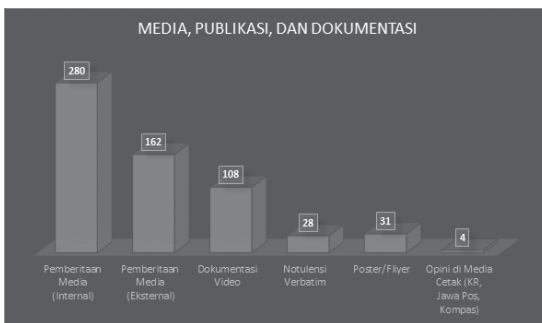


Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

Keenam, buku putih Arah Tatahan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman www.kongreskebudayaandesa.id; 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantari semua agenda kongres.

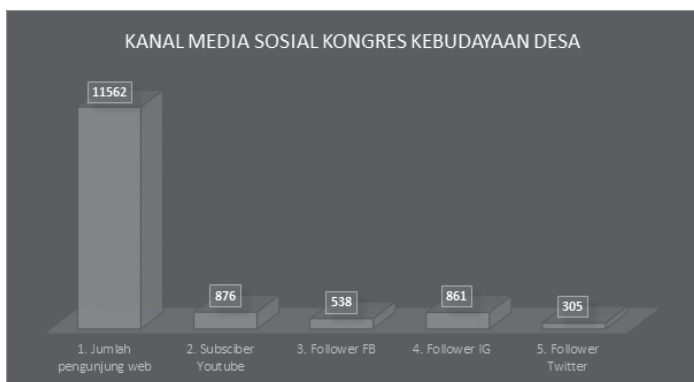
Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD



Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung www.kongreskebudayaandesas.id sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungkasi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi



dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *problematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki



kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesdesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun*.

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah



Desa Panggunharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesuhi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumanga'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan!

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta





Deklarasi

ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

Mengingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan



ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2020



KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

Ketua: Ryan Sugiarto

A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana

5. Yesseta Novi Sukma

Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoirul Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



B. Program: Aditya Mahendra Putra

Tim Webinar

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

Tim Festival

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikenco
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

Tim Buku dan Call Of Papers

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Arif Gunawan
3. Ageng Indra Sumarah
4. Agus Teriyana
5. Ahmad Yasin
6. Amanatia Junda Solikhah
7. Asy Syaffa Nada Amatullah
8. Berryl Ilham
9. Chusna Rizqati
10. Citra Maudy Mahanani
11. Rheisnayucyntara
12. Dadang Ari Murtono
13. Diah Rizki Fitriani
14. Dwi Cipta
15. Dyah Permatasari
16. Fawaz
17. Fitriana Hadi
18. Fiqih Rahmawati
19. Gregorius Ragil Wibawanto
20. Irfan Afifi
21. Iswan Heriadjie
22. Ketjilbergerak
23. Kusharditya Albihafifzal
24. Prima Hidayah
25. Rio Anggoro Pangestu
26. Rofi Ali Majid
27. Suhairi Ahmad
28. Yona Primadesi





KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



REKAMERKAS
REKAMERKAS
REKAMERKAS

